

Buletin Ilmiah

Marina

Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan
Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

marina	Vol. 3	No. 2	Hal: 53 - 97	Jakarta, Desember 2017	ISSN: 2502-0803
--------	--------	-------	--------------	------------------------	-----------------

Buletin Ilmiah "MARINA"
Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
VOLUME 3 NO. 2 DESEMBER 2017

Marina Buletin Ilmiah Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan adalah Buletin Ilmiah yang diterbitkan oleh Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, dengan tujuan menyebarkan hasil karya tulis ilmiah di bidang Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan.

Penerbit:

Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
(BBRSEKP)

bekerjasama dengan

Indonesian Marine and Fisheries Socio-Economics Research Network
(IMFISERN)

Penanggung Jawab:

Kepala Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Dewan Redaksi :

Ketua:

Dr. Tajerin (*Perencanaan dan Kebijakan Ekonomi Publik*)

Anggota:

Dr. Siti Hajar Suryawati (*Pengelola Sumber Daya Lingkungan*)

Dr. Achmad Rizal (*Kebijakan Lingkungan*)

Ary Wahyono, M.Si (*Studi dan Kemasyarakatan*)

Imam Syafii, M. Si (*Sejarah Maritim*)

Redaksi Pelaksana :

Catur Pramono Adi, M. Si
Andrian Ramadhan, S. Pi, MT
Rizki Muhartono, M. Si
Nila Mustikawati, S. Si
Asep Jajang Setiadi, S. Pi
Ilham Ferbiansyah, S. Kom

Mitra Bestari

Prof. Dr. Heny Warsilah (*Planologi - LIPI*)

Dr. Jardie Androkles Andaki, S. Pi, M. Si (*Universitas Sam Ratulangi*)

Dr. Venda Jolanda Pical (*Universitas Pattimura*)

Ir. Masyhuri Imron, MA (*Sosiologi-LIPI*)

Ir. Eni Yulinda, M. Si (*Universitas Riau*)

Alamat Redaksi:

Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
Gedung Balitbang KP Lt. 3 Jalan Pasir Putih Nomor 1 Ancol Timur, Jakarta Utara
Telp. (021) 6471 1583, Faks. (021) 64700924
Jurnal Online: <http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/mra>
Email: pt.bosek@gmail.com

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, kami panjatkan Kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas terbitnya Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Volume 3 Nomor 2 Tahun 2017 ini. Buletin ini merupakan perubahan dari penerbitan Warta Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan yang sebelumnya telah dipublikasikan mulai dari Vol. 1 Tahun 2006 sampai Vol. 9 tahun 2014. Perbaikan ini ditujukan dengan alasan meningkatkan kualitas tulisan yang dimuat serta penyesuaian terhadap pedoman akreditasi majalah ilmiah dari LIPI.

Judul artikel ilmiah yang di muat pada Buletin Ilmiah “Marina” Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Volume 3 Nomor 2 Tahun 2017 yaitu; (i) Membangun Kemitraan dan Kelembagaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Melalui Klinik Iptek Mina Bisnis di Kabupaten Takalar; (ii) Saluran, Margin dan Efisiensi Pemasaran Rumput Laut di Sentra Kawasan Minapolitan Kabupaten Sumbawa; (iii) Penerapan Materi Muatan dalam Kesepakatan Internasional untuk Kebijakan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; (iv) Usaha Budi Daya Ikan Lele (*clarias Sp*) pada Kawasan Minapolitan “Kampung Lele” Kabupaten Boyolali; (v) Potensi Usaha Budi Daya Rumput Laut di Pulau Panjang Kabupaten Serang, Banten. Artikel-artikel tersebut diharapkan dapat memberikan masukan bagi para pelaku usaha dan pengambil kebijakan di sektor kelautan dan perikanan terutama dari sisi sosial ekonomi.

Redaksi berharap semoga seluruh informasi yang disajikan dapat bermanfaat dalam menambah wawasan dan pengetahuan bagi para pembaca. Kami selaku redaksi mengharapkan saran dan kritik dari para pembaca untuk penyempurnaan penerbitan buletin berikutnya.

Selamat membaca dan terimakasih

Redaksi.

Buletin Ilmiah "MARINA"
Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

VOLUME. 3 NO. 2 DESEMBER 2017

DAFTAR ISI	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
LEMBAR ABSTRAK	iii-v
 MEMBANGUN KEMITRAAN DAN KELEMBAGAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR MELALUI KLINIK IPTEK MINA BISNIS DI KABUPATEN TAKALAR <i>Oleh : Achmad Zamroni dan Istiana</i>	 53 - 60
 SALURAN, MARGIN DAN EFISIENSI PEMASARAN RUMPUT LAUT DI SENTRA KAWASAN MINAPOLITAN KABUPATEN SUMBAWA <i>Oleh : Hikmah dan Agus Heri Purnomo</i>	 61 - 69
 PENERAPAN MATERI MUATAN DALAM KESEPAKATAN INTERNASIONAL UNTUK KEBIJAKAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN <i>Oleh : Bayu Vita Indah Yanti dan Hertria Maharani Putri</i>	 71 - 78
 USAHA BUDI DAYA IKAN LELE (<i>Clarias sp</i>) PADA KAWASAN MINAPOLITAN "KAMPUNG LELE" KABUPATEN BOYOLALI <i>Oleh : Maulana Firdaus, Hertria Maharani Putri dan Rani Hafsaridewi</i>	 79 - 89
 POTENSI USAHA BUDI DAYA RUMPUT LAUT DI PULAU PANJANG KABUPATEN SERANG, BANTEN <i>Oleh : Permana Ari Soejarwo</i>	 91 - 96

Kata kunci bersumber dari artikel. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa ijin dan biaya

**MEMBANGUN KEMITRAAN DAN KELEMBAGAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR MELALUI
KLINIK IPTEK MINA BISNIS DI KABUPATEN TAKALAR**

*Building Partnership and Economic Institution for Coastal Community through Science and Technology
Clinic of Fisheries Business in Takalar District*

Achmad Zamroni dan Istiana

ABSTRAK

Partisipasi masyarakat lokal merupakan komponen utama yang mendukung keberhasilan pembentukan kelembagaan usaha di Kabupaten Takalar. Makalah ini mempunyai tiga tujuan utama, yaitu: 1) Mengidentifikasi informasi sosial ekonomi masyarakat pesisir dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan; 2) Mengidentifikasi unsur-unsur mitra dalam membentuk kelembagaan; dan 3) Membentuk konsep model kelembagaan bisnis masyarakat pesisir. Survey dilakukan di Desa Laikang Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Data primer diperoleh dari hasil wawancara informan kunci dengan menggunakan kuesioner semi-struktur yang menggunakan teknik *Focus Group Discussion (FGD)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi perikanan di Desa Laikang meliputi perikanan tangkap (pelagis kecil, rajungan, kakap, kerapu, dan lain-lain), perikanan budidaya (rumput laut, udang, bandeng), dan produk kelautan (garam dan wisata bahari). Usaha perikanan tersebut dilakukan secara mandiri oleh nelayan dan pembudidaya ikan/ rumput laut dan untuk beberapa kegiatan dilakukan secara berkelompok. Namun, semua jenis usaha/bisnis tersebut belum dikelola oleh kelembagaan bisnis secara baik. Oleh karena itu, konsep kelembagaan bisnis yang mengutamakan partisipasi masyarakat masih menjadi pilihan utama dalam mengelola usaha perikanan "satu pintu" di Desa Laikang. Bentuk lembaga yang dibentuk adalah koperasi perikanan yang mengelaborasi kelompok-kelompok usaha menjadi unit-unit usaha koperasi yang dibentuk tersebut.

Kata Kunci: kelembagaan; usaha perikanan; koperasi

ABSTRACT

Local community participation is main component of developing business institution in Takalar District. This study aims to; 1) Identify socio-economics information of coastal community on marine and fisheries resource usage, 2) Identify the components of partnership to perform the business institution, and 3) Create the concept of business institution model for coastal community. Survey was conducted in Laikang Village, Mangarabombang Sub Village, Takalar District South Sulawesi. Primary data were gathered through interview and Focus Group Discussion (FGD) by using semi-structured questionnaires. The result shows that potency of fisheries in Laikang Village are capture fisheries (small pelagics, crabs, groupers, and seabass etc), culture fisheries (seaweed, shrimp and milkfish), marine product (salt and marine tourism). Various marine and fisheries activities are conducted independently by fishermen, and some of them are using collective way. However, all of those marine and fisheries activities have not been well managed. Therefore, the concept of business institution based on community participation is a main option to manage fisheries business in Laikang Village under "one direction". One of the best alternative of institution is developing fisheries cooperative, which is an evolution among business groups to become business units in fisheries cooperative.

Keywords: *institution; fisheries business; cooperative*

Kata kunci bersumber dari artikel. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa ijin dan biaya

**SALURAN, MARGIN DAN EFISIENSI PEMASARAN RUMPUT LAUT DI
SENTRA KAWASAN MINAPOLITAN KABUPATEN SUMBAWA**

***Seaweed Marketing Channels, Margin and Efficiency
in The Minapolitan Area of Sumbawa District***

Hikmah dan Agus Heri Purnomo

ABSTRAK

Komoditas rumput laut merupakan salah satu komoditas yang mampu meningkatkan ekonomi masyarakat, menyerap tenaga kerja dan meningkatkan devisa, namun mengalami permasalahan pada aspek pemasaran terutama menyangkut lembaga, saluran, dan jaringan serta pola pemasaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola saluran, margin dan efisiensi pemasaran yang diperoleh masing-masing lembaga. Pemasaran data dikumpulkan dengan observasi dan wawancara, di mana populasi dalam penelitian ini adalah pembudiaya rumput laut, pengumpul rumput laut, eksportir dan industri pengolahan rumput laut di Kabupaten Sumbawa. Pemilihan sampel (responden) pembudidaya rumput laut digunakan metode *purposive sampling*, sedangkan sampel pedagang digunakan metode *snowball sampling*. Analisis data menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif berdasarkan analisis biaya dan margin pemasaran serta perhitungan pangsa (*farmer's share*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola saluran pemasaran rumput laut di sentra kawasan minapolitan Kabupaten Sumbawa terbagi menjadi tiga, dimana saluran pemasaran saluran 1 lebih panjang dibanding saluran pemasaran 2 dan 3. Saluran yang paling efisien terjadi pada saluran pemasaran 2 dimulai dari pembudidaya dijual ke pengumpul lokal 2 diteruskan pedagang besar di Lombok kemudian ke eksportir Surabaya dan berakhir di pabrik mancanegara. Pada saluran ini merupakan saluran yang relatif lebih pendek dan margin yang kecil 13,3 % atau Rp. 1000,- (per kilogram) serta nilai *farmer's share* (86,67 %) yang paling besar dibanding saluran 1 dan 2. Untuk itu perlu dukungan kebijakan untuk menguatkan saluran pemasaran 2 dengan meningkatkan keberpihakan terhadap pembudidaya rumput laut yang tercermin dari besaran *farmer's share*.

Kata Kunci: saluran pemasaran; margin; efisiensi rumput laut

ABSTRACT

Seaweed is a commodity that could improve the community economic, absorb labor and increase foreign exchange. However, problems occur in marketing particularly related to institutions, channels, networks and marketing patterns. This study aims to determine the channel patterns, margins and marketing efficiency obtained by each institution. Data was collected by observations and interviews toward seaweed growers, seaweed collectors, exporters and seaweed processing industries in the Sumbawa Regency. Samples (respondents) of seaweed farmers were selected using purposive sampling method, while the merchant samples were selected using snowball sampling method. Quantitative descriptive approach was used to analyzed the data based on analysis of marketing costs and margins as well as share calculations (farmer's share). The study suggests that the seaweed marketing channel pattern in minapolitan zone of Sumbawa District was divided into three, type where marketing channel 1 were longer than marketing channel 2 and 3. The most efficient channel occurred in marketing channel 2 starting from farmers to local collectors 2, forwarded to wholesalers in Lombok, then to Surabaya exporters and ended up in foreign factories. This is a relatively shorter channel with small margin of 13.3% or Rp. 1000, - (per kilogram) and has the highest value of farmer's share (86.67%) compared to channel 1 and 2. Therefore, policy is necessary to strengthen marketing channel 2 by supporting seaweed farmers as reflected in farmer's share percentages.

Keywords: *marketing channels; margin; seaweed efficiency*

Kata kunci bersumber dari artikel. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa ijin dan biaya

**PENERAPAN MATERI MUATAN DALAM KESEPAKATAN INTERNASIONAL UNTUK
KEBIJAKAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Implementation Content of International Convention in National Policy of Marine and Fisheries Resources

Bayu Vita Indah Yanti dan Hertria Maharani Putri

ABSTRAK

Indonesia dikenal sebagai negara yang cukup aktif dalam komunitas internasional terkait dengan pemanfaatan sumber daya hayati. Makalah ini bertujuan untuk menganalisis penerapan materi muatan dalam kesepakatan internasional untuk kebijakan pemanfaatan sumber daya hayati. Hasil analisis dengan menggunakan *content analysis* terhadap materi muatan peraturan perundang-undangan, menunjukkan bahwa penerapan materi muatan dalam kesepakatan internasional tetap disesuaikan dengan kepentingan Indonesia. Artinya, penerapan secara keseluruhan materi kesepakatan tersebut dengan mempertimbangkan kepentingan politik Indonesia.

Kata Kunci: materi muatan; kesepakatan; sumber daya hayati; kelautan dan perikanan

ABSTRACT

Indonesia actively participates in international community concerning natural resources. This paper aims to analyze the implementation of international agreement contents toward Indonesian marine and fisheries resource policy. This study were used content analysis toward regulation contents. The result shows that the implementation of international agreement substances is adjusted to Indonesia interests. It, means that all agreements might consider the political interests of Indonesia.

Keywords: content material; agreements; biological resources; marine resources and fisheries

Kata kunci bersumber dari artikel. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa ijin dan biaya

**USAHA BUDI DAYA IKAN LELE (*Clarias sp*) PADA KAWASAN MINAPOLITAN “KAMPUNG LELE”
KABUPATEN BOYOLALI**

Catfish Aquaculture Bussiness at Minapolitan Area “Kampung Lele” in The Boyolali District

Maulana Firdaus, Hertria Maharani Putri dan Rani Hafsaridewi

ABSTRAK

Kabupaten Boyolali merupakan salah satu kawasan minapolitan yang ada di Jawa Tengah, yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor KEP.32/MEN/2010 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan. Berdasarkan keputusan tersebut, pengembangan usaha perikanan khususnya budidaya ikan lele (*clarias Sp*) semakin gencar dilakukan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui gambaran pola pengelolaan, permasalahan yang dihadapi, pemasaran hasil produksi, serta memberikan gambaran terhadap struktur biaya, penerimaan, keuntungan dan nilai *R/C ratio*. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus, dengan pemilihan sampel menggunakan *purposive sampling*. Berdasarkan hasil analisis, usaha budidaya ikan lele di Desa Tegal Rejo secara keseluruhan masih layak diusahakan karena memiliki nilai *R/C ratio* > 1. Permasalahan usaha yang dihadapi oleh pembudidaya terkait dengan ketersediaan benih, kenaikan harga pakan, harga jual ikan lele dan serangan penyakit. Oleh karena itu, dalam menjaga keberlanjutan usaha budidaya ikan lele pada kawasan minapolitan “Kampung Lele” Desa Tegal Rejo, perlu diperhatikan daya dukung lingkungan serta pengelolaan usaha yang baik.

Kata Kunci: budidaya ikan lele; minapolitan; Boyolali
ABSTRACT

Boyolali is one of Minapolitan Area in Central Java Province as defined in the decree of Minister of Marine Affairs and Fisheries Number KEP.32/MEN/2010. Consequently, catfish (clarias SP) aquaculture in this area are increasingly developed. This study aims to describe the management patterns, problems and marketing as well as to illustrate the cost structure, revenue, profits and the value of R/C ratio. This research applied case study method and purposive sampling method. Overall, aquaculture business of catfish in Tegalrejo is feasible due to its value of R/C ratio > 1. However, problems related to this aquaculture business are availability of seed, increased feed price, catfish price and disease attack. Therefore, the sustainability of catfish farming in “Kampung Lele” Tegalrejo Village should be strengthened with supporting environment and good business management.

Keywords: catfish aquaculture; minapolitan; Boyolali

Kata kunci bersumber dari artikel. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa ijin dan biaya

POTENSI USAHA BUDI DAYA RUMPUT LAUT DI PULAU PANJANG KABUPATEN SERANG, BANTEN

Potency of Seaweed Farming Business in Pulau Panjang Serang Districts, Banten

Permana Ari Soejarwo

ABSTRAK

Pulau Panjang merupakan salah satu wilayah pesisir di Kabupaten Serang Provinsi Banten yang mempunyai potensi dari sektor kelautan dan perikanan. Usaha budi daya rumput laut diprediksi mampu meningkatkan pendapatan masyarakat di Pulau panjang. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan potensi usaha rumput laut di Pulau Panjang Kabupaten Serang. Data dan informasi dikumpulkan melalui media diskusi (*Focus Group Discussion/FGD*), observasi lapangan serta dengan pengumpulan data sekunder. Data dianalisis secara deskriptif dengan memberikan gambaran mengenai potensi usaha budi daya rumput laut baik dari segi produksi rumput laut, rata-rata pendapatan pembudi daya, peningkatan serapan tenaga serta nilai tambah komoditas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam luasan budi daya rumput laut yang mencapai 100 ha diperoleh 224 ton rumput laut berat kering dalam sekali panen (45 hari) dengan nilai 3.360.000.000 atau 16.800.000 per petakan (0.5 ha). Sementara itu serapan tenaga kerja pada usaha budi daya rumput laut ini dapat mencapai 1000 orang untuk luasan 100 Ha hal ini dapat membantu mengurangi jumlah pengangguran, sedangkan dari sisi nilai tambah komoditi rumput laut dapat diproses menjadi beberapa produk makanan yang diminati masyarakat dan mempunyai nilai jual yang bagus.

Kata Kunci: rumput laut; Pulau Panjang; tenaga kerja

ABSTRACT

Pulau Panjang is one of coastal area in Serang Regency with potential in marine and fisheries sectors. Seaweed farming is predicted to be able to increase community income in Pulau Panjang. This study aims to describe potency of seaweed farming in Pulau Panjang, Serang Regency. Data and information were collected through Focus Group Discussion (FGD), field observation and secondary data. Data were analyzed descriptively by describing about seaweed farming potency from seaweed production, average income of seaweed farmer, increased number of labour and added value of commodity. Result of this study shows that seaweed farming area of 100 ha produced 224 tons of dry seaweed in one harvest period (45 days) with value of 3.360.000 or 16.800.000 per plot area (0.5 ha). Meanwhile, it absorbs labours up to 1000 persons for 100 ha area. Thus, seaweed farming helps to reduce the number of unemployment, and it creates additional values of seaweed which they could be processed into numerous food products.

Keywords: seaweed; Pulau panjang; labour absorption

MEMBANGUN KEMITRAAN DAN KELEMBAGAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR MELALUI KLINIK IPTEK MINA BISNIS DI KABUPATEN TAKALAR

Building Partnership and Economic Institution for Coastal Community through Science and Technology Clinic of Fisheries Business in Takalar District

***Achmad Zamroni dan Istiana**

Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
Gedung BRSDMKP I Lt. 4

Jalan Pasir Putih Nomor 1 Ancol Timur, Jakarta Utara

Telp: (021) 64711583 Fax: 64700924

*email: roni_socio@yahoo.com

Diterima tanggal: 21 Juni 2017 Diterima setelah perbaikan: 9 November 2017

Disetujui terbit: 7 Desember 2017

ABSTRAK

Partisipasi masyarakat lokal merupakan komponen utama yang mendukung keberhasilan pembentukan kelembagaan usaha di Kabupaten Takalar. Makalah ini mempunyai tiga tujuan utama, yaitu: 1) Mengidentifikasi informasi sosial ekonomi masyarakat pesisir dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan; 2) Mengidentifikasi unsur-unsur mitra dalam membentuk kelembagaan; dan 3) Membentuk konsep model kelembagaan bisnis masyarakat pesisir. Survey dilakukan di Desa Laikang Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Data primer diperoleh dari hasil wawancara informan kunci dengan menggunakan kuesioner semi-struktur yang menggunakan teknik *Focus Group Discussion (FGD)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi perikanan di Desa Laikang meliputi perikanan tangkap (pelagis kecil, rajungan, kakap, kerapu, dan lain-lain), perikanan budidaya (rumput laut, udang, bandeng), dan produk kelautan (garam dan wisata bahari). Usaha perikanan tersebut dilakukan secara mandiri oleh nelayan dan pembudidaya ikan/ rumput laut dan untuk beberapa kegiatan dilakukan secara berkelompok. Namun, semua jenis usaha/bisnis tersebut belum dikelola oleh kelembagaan bisnis secara baik. Oleh karena itu, konsep kelembagaan bisnis yang mengutamakan partisipasi masyarakat masih menjadi pilihan utama dalam mengelola usaha perikanan "satu pintu" di Desa Laikang. Bentuk lembaga yang dibentuk adalah koperasi perikanan yang mengelaborasi kelompok-kelompok usaha menjadi unit-unit usaha koperasi yang dibentuk tersebut.

Kata Kunci: kelembagaan; usaha perikanan; koperasi

ABSTRACT

Local community participation is main component of developing business institution in Takalar District. This study aims to: 1) Identify socio-economics information of coastal community on marine and fisheries resource usage, 2) Identify the components of partnership to perform the business institution, and 3) Create the concept of business institution model for coastal community. Survey was conducted in Laikang Village, Mangarabombang Sub Village, Takalar District South Sulawesi. Primary data were gathered through interview and Focus Group Discussion (FGD) by using semi-structured questionnaires. The result shows that potency of fisheries in Laikang Village are capture fisheries (small pelagics, crabs, groupers, and seabass etc), culture fisheries (seaweed, shrimp and milkfish), marine product (salt and marine tourism). Various marine and fisheries activities are conducted independently by fishermen, and some of them are using collective way. However, all of those marine and fisheries activities have not been well managed. Therefore, the concept of business institution based on community participation is a main option to manage fisheries business in Laikang Village under "one direction". One of the best alternative of institution is developing fisheries cooperative, which is an evolution among business groups to become business units in fisheries cooperative.

Keywords: institution; fisheries business; cooperative

Korespondensi Penulis:

Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
Gedung Balitbang KP I Lt. 4 Jalan Pasir Putih Nomor 1 Ancol Timur, Jakarta Utara, Indonesia
Telp: (021) 64711583 Fax: 64700924

PENDAHULUAN

Potensi sumber daya pesisir yang besar belum dikelola dengan baik karena akses teknologi, modal dan pasar masih lemah serta kemampuan (pengelolaan dan pemanfaatan) masyarakat lokal dan kota masih terdapat kesenjangan. Kondisi seperti ini menggambarkan bahwa potensi sumber daya kelautan dan perikanan belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan bangsa secara keseluruhan (Pomeroy and Rivera, 2006; Priyono and Pranarka, 1996). Hal tersebut menjadi salah satu faktor kemiskinan masih menjadi masalah yang serius di wilayah pesisir. Secara umum ada 4 (empat) hal pokok yang menyebabkan kemiskinan masyarakat kelautan dan perikanan adalah sebagai berikut: (1) kualitas sumber daya manusia (SDM) masih rendah; (2) pemanfaatan teknologi di bidang kelautan dan perikanan masih rendah; (3) Jaringan pemasaran masih terbatas sempit; dan (4) permodalan yang masih sulit untuk diakses oleh nelayan kecil. Upaya pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat merupakan agenda tetap tahunan yang dilakukan pemerintah Indonesia sampai sekarang (Karsidi, 2001; Sumodiningrat, 1999; Kartasasmita, 1996).

Pada level lokal, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Takalar relatif stabil dalam lima tahun terakhir (2008-2012) yaitu rata-rata 6,87% per tahun. Disisi lain, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) hanya memberikan kontribusi sebesar 1,72% terhadap PDRB Sulawesi Selatan. Nilai tersebut merupakan paling rendah dibandingkan dengan kabupaten lain di Propinsi Sulawesi Selatan. Pada sektor riil, pertumbuhan rata-rata sektor pertanian (termasuk perikanan) sebesar 7,34% per tahun. Nilai tersebut mengalami kenaikan, sebesar 32,8% sejak tahun 2008 hingga tahun 2012. Pada tahun 2012, peranan sektor pertanian memberikan kontribusi terbesar terhadap total PDRB Kabupaten Takalar sebesar 45,88%, dan sub sektor kelautan dan perikanan memberikan kontribusi pada sektor pertanian sebesar 27,75% (BPS, 2013).

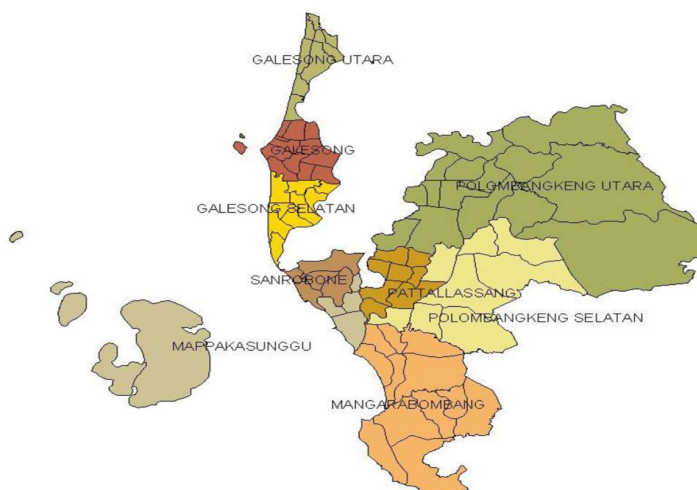
Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa Kabupaten Takalar memiliki potensi sumber

daya pertanian dan perikanan yang masih berpeluang untuk dikembangkan. Komoditas yang diunggulkan diantaranya rumput laut dan jenis ikan pelagis dilakukan secara berkelompok dan mandiri oleh nelayan dan pembudidaya. Namun, kegiatan usaha tersebut belum dikelola oleh kelembagaan bisnis secara baik. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya peningkatan kapasitas produk budidaya, pengolahan dan pemasaran dengan dukungan pemerintah dan stakeholder lokal untuk meningkatkan ekonomi rumah tangga nelayan dan pembudidaya. Berdasarkan informasi awal terkait dengan potensi sumber daya kelautan dan perikanan (SDKP) yang cukup baik, maka upaya peningkatan kapasitas pelaku usaha dan pembentukan kelembagaan ekonomi masyarakat merupakan kebutuhan yang mendesak dilakukan di Desa Laikang. Oleh karena itu, makalah ini akan menjawab tiga tujuan utama, yaitu: 1) Mengeksplorasi informasi sosial ekonomi masyarakat pesisir dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan; 2) menganalisis keragaman dan permasalahan pada usaha perikanan. 3) Membentuk konsep model kelembagaan bisnis masyarakat pesisir.

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif (Rahmat, 2005) dengan pendekatan metode survey melalui wawancara mendalam dengan kuesioner semi-terstruktur secara intensif terhadap informan kunci yang dipilih secara *purposive* pada bulan April – November 2015. Data primer juga diperoleh melalui *Focus Group Discussion* (FGD) dengan para pemangku kepentingan. Sementara data sekunder berupa bahan-bahan tertulis (laporan dan data statistik) diperoleh dari institusi terkait di Kabupaten Takalar.

GAMBARAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

Kabupaten Takalar yang beribukota di Pattallassang terletak 5°031' sampai 5°0381' Lintang Selatan dan antara 199°0221' sampai 199°0391' Bujur Timur. Bagian timur secara administrasi berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Jeneponto. Bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Gowa. Bagian barat dan selatan dibatasi oleh Selat Makassar dan Laut Flores (BPS, 2013).



Gambar 1. Peta Kabupaten Takalar tahun 2012.

Sumber: BPS, 2013

Luas Wilayah Kabupaten Takalar sebesar 566,51 km² yang terdiri dari 9 kecamatan dan 100 wilayah desa/kelurahan (76 desa dan 24 kelurahan). Jarak Ibukota Kabupaten Takalar dengan ibukota Propinsi Sulawesi Selatan mencapai 45 km yang melalui Kabupaten Gowa. Potensi unggulan Kabupaten Takalar terdiri dari sektor pertanian, perikanan, peternakan, *homeindustry* dan pariwisata. Berdasarkan lapangan usaha di Kabupaten Takalar, bidang pertanian memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Takalar dengan persentase mencapai 47,25%.

Jumlah penduduk Kabupaten Takalar berdasarkan hasil Penghitungan Dana Alokasi Umum (DAU) 2012 sebanyak 275.034 jiwa yang tersebar di 9 (sembilan) kecamatan, dengan jumlah penduduk terbesar berada di Kecamatan Polombangkeng Utara, yakni 46.748 jiwa. Rasio jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan lebih banyak dari penduduk yang berjenis kelamin laki-laki perkabupaten, dimana 132.325 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 142.709 jiwa berjenis kelamin perempuan. Menurut BPS, angka rasio jenis kelamin diperoleh 92,72 (93), dapat diartikan bahwa setiap 100 orang berjenis kelamin perempuan terdapat 93 orang berjenis kelamin laki-laki. Kepadatan penduduk di Kabupaten Takalar pada tahun 2012 mencapai 485 jiwa/km². Kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Galesong Utara, dengan tingkat kepadatan

mencapai 2.428 jiwa/km², dan kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah berada di Kecamatan Polombangkeng Utara dengan angka kepadatan 220 jiwa/km².

Masyarakat Kabupaten Takalar terdiri dari berbagai suku yaitu masyarakat asli Takalar, Suku Bajo, Bugis, Suku Jawa dan masyarakat pendatang lain yang berasal dari pulau-pulau disekitarnya. Kultur budaya masyarakat di Kabupaten Takalar maih dipengaruhi oleh etnis budaya Bugis-Makassar. Keragaman kultur sosial budaya yang terdapat di Kabupaten Takalar, merupakan pembentukan etnis dan budaya lokal, secara umum masih tergolong dalam Suku Makassar. Perbedaan dalam hal budaya umunya terletak pada dialeg, dan sistem upacara adat dan ritual keagamaan, dan bentuk bangunan.

Pendidikan merupakan suatu kebutuhan wajib masyarakat untuk peningkatan kualitas hidupnya. Kabupaten Takalar memiliki sarana dan prasarana pendidikan bagi masyarakatnya mulai dari jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) hingga sekolah menengah atas. Pada tahun 2012, sarana formal yang ada di Kabupaten Takalar meliputi sekolah setingkat SD 245 buah, SLTP 75 buah dan SLTA 41 buah, dengan rasio murid terhadap guru masing-masing untuk SD 11,97, SLTP 8,66 dan untuk SLTA 9,56. Selain pendidikan, fasilitas kesehatan juga tersedia di Kabupaten Takalar seperti rumah sakit, puskesmas

pembantu /pustu dan puskesmas keliling. Kabupaten Takalar memiliki 1 (satu) rumah sakit pemerintah, 14 buah puskesmas, 50 puskesmas pembantu dan puskesmas keliling sebanyak 14 buah. Sarana tersebut didukung tenaga kesehatan yaitu 532 orang dengan kualifikasi 17 dokter umum, 14 dokter gigi, 7 apoteker, 42 sarjana kesehatan, 180 perawat dan 95 bidan.

PEMANFAATAN SUMBER DAYA PERIKANAN DI KABUPATEN TAKALAR

Perairan pesisir untuk kegiatan perikanan tangkap dengan bagan menggunakan perahu < 10 GT penekanan pada kegiatan penangkapan udang, ikan pelagis dan ikan laut lainnya skala kecil pada jalur penangkapan 0 – 4 mil dari garis pantai. Perairan pesisir untuk kegiatan perikanan tangkap komersil untuk perahu/kapal ikan 10 – 30 GT penekanan pada kegiatan penangkapan udang, ikan pelagis dan ikan laut lainnya skala komersil pada jalur penangkapan > 4 mil dari garis pantai. Kabupaten Takalar mempunyai 74 km panjang pantai dengan sentra pelabuhan ikan di Galesong Selatan dan pengembangan PPI di Be'ba. Kawasan untuk perikanan tangkap terdapat di perairan Selat Makassar yang mencakup Kecamatan Mappakasunggu, Mangarabombang, Galesong Utara, dan Galesong Selatan.

Produksi perikanan tangkap di kabupaten ini memiliki pangsa pasar tersendiri yaitu pasar domestik dan ekspor. Penjualan ikan di pasar domestik dilakukan dalam bentuk ikan beku, ikan kering, ikan hidup dan ikan segar. Umumnya pasar domestik adalah pasar-pasar lokal pada masing-masing wilayah penangkapan Kabupaten Takalar, Makassar dan Surabaya. Pasar ekspor, negara tujuan adalah Korea, Singapura dan Amerika Serikat .

Kemampuan produksi sub sektor perikanan tangkap laut sangat ditentukan oleh alat tangkap dan perlengkapan yang digunakan nelayan. Perahu yang digunakan nelayan di Kabupaten Takalar adalah kapal motor dan perahu motor tempel (katinting) serta perahu tanpa motor. Alat tangkap sebagian besar menggunakan jaring insang, pancing, rawai dan pukot pantai. Kabupaten Takalar memiliki

Rumah Tangga Perikanan (RTP) tangkap sebanyak 5.262 RTP dan 5.212 nelayan yang tersebar di 6 (enam) kecamatan.

Kabupaten Takalar juga memiliki potensi sumber daya budidaya perikanan meliputi budidaya laut, budidaya air payau dan budidaya air tawar. Komoditas perikanan budidaya laut adalah rumput laut jenis *eucheuma cottonii*. Komoditas budidaya air payau (tambak) adalah udang windu, bandeng, rumput laut jenis *glacilaria sp* dan garam. Sedangkan komoditas budidaya air tawar (kolam) adalah ikan mas dan nila. Luas areal budidaya di Kabupaten Takalar tahun 2012 yang menjelaskan bahwa pemanfaatan lahan tambak mengalami penurunan sebesar 8,34% dari tahun 2011. Pemanfaatan lahan untuk kolam mengalami kenaikan sebesar 61,83% dari tahun 2011, yang juga mengalami kenaikan sebesar 49,25% dari tahun 2010.

Pada tahun 2012, jumlah RTP budidaya sebanyak 5.262 RTP dengan jumlah pembudidaya sebanyak 5.212 pembudidaya. Jumlah rumah tangga perikanan budidaya mengalami penurunan sebesar 9,27% dari tahun sebelumnya (2011), begitu juga jumlah pembudidaya yang mengalami penurunan sebesar 38,8% dari tahun 2011. Hal tersebut berbanding dengan pemanfaatan lahan yang mengalami kenaikan, sehingga dapat diduga bahwa jumlah kepemilikan dan pemanfaatan oleh pembudidaya mengalami penambahan.

Pengolahan hasil perikanan yang ada di Kabupaten Takalar untuk hasil perikanan tangkap hanya untuk rajungan yaitu perebusan saja karena yang dijual hanya daging rajungan yang dilakukan oleh pedagang pengepul. Potensi pengembangan pengolahan hasil perikanan sangat terbuka di wilayah ini, karena belum dilakukan secara maksimal. Produksi penangkapan yang besar berpotensi dapat meningkatkan taraf hidup nelayan dengan memperpanjang rantai produksi dengan melakukan variasi ikan olahan. Hal ini jika diterapkan akan melindungi nelayan dari rendahnya harga hasil tangkapan, terutama pada musim ikan melimpah.

Pemanfaatan teknologi dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan yang ada di Kabupaten Takalar belum dilakukan secara optimal oleh masyarakat nelayan. Hal tersebut terlihat dari penggunaan kapal motor yang kapasitasnya di bawah 5 GT (*gross tonnase*) dengan sistem penangkapan *one day fishing*. Pemanfaatan teknologi pada perikanan budidaya juga belum diaplikasikan oleh masyarakat pembudidaya rumput laut. Teknik budidaya bersifat sederhana (menggunakan tali ris saja tanpa dibatasi dengan jaring) dan menyesuaikan dengan musim angin (utara dan selatan). Begitu juga pengolahan hasil budidaya rumput laut yang hanya diolah menjadi rumput kering saja. Padahal pemerintah provinsi dan daerah telah memberikan pelatihan pengolahan rumput laut menjadi dodol, manisan dan stick rumput laut. Alasan pembudidaya tidak mengadopsi teknologi tersebut karena mereka tidak mengetahui pangsa pasar hasil olahan rumput laut.

Masyarakat Desa Banggae lebih banyak beraktivitas disektor pertanian (60%) dan hanya sekitar 40% yang beraktivitas di sektor perikanan (20% sebagai nelayan dan petani; 20% hanya sebagai nelayan). Kehidupan sehari-hari masyarakat Desa Banggae lebih banyak di sektor pertanian walaupun dia sebagai nelayan. Mereka hidup tergantung musim tanam buah. Meskipun terdapat potensi perikanan tangkap dan budidaya payau & kolam, masyarakat tidak memanfaatkannya sebagai lahan ekonomis. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat desa ini bukan merupakan masyarakat pesisir.

Sekitar 30% masyarakat Desa Topejawa adalah nelayan dan 60% penduduknya merupakan petani yang 20% diantaranya memiliki empang budidaya Ikan Mas dan Ikan Nila. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Desa Topejawa merupakan masyarakat pertanian. Desa Laikang terletak di pesisir pantai yang membentuk masyarakat beraktivitas. Sebagian besar pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan di Desa Soreang adalah usaha budidaya air payau. Sistem budidaya adalah polikultur dengan 3 komoditas (udang windu, bandeng dan *jombe* (rumput laut *gracilaria sp*). Desa Bontomaranu 90%

penduduk bekerja sebagai nelayan. Desa Boddia, dari 6 dusun, hanya 2 dusun yang petani, lainnya nelayan.

Kondisi infrastruktur jalan Desa Banggae adalah tanah padat yang sebagian sudah diaspal. Desa ini juga telah memiliki infrastruktur penerangan berupa listrik dari PLN dan air bersih dari PDAM. Infrastruktur lainnya yaitu perbankan (BRI) yang telah memberikan KUR pada masyarakat desa ini. Aksesibilitas desa ini tergolong mudah karena jarak tempuh desa ke Kecamatan Mangarabombang sekitar 1,90 km dan jarak ke kabupaten sejauh 8,8 km.

Desa Laikang memiliki infrastruktur penunjang kegiatan usaha budidaya rumput laut seperti gudang dan kebun bibit. Desa ini merupakan desa terjauh dengan jarak tempuh ke Kecamatan Mangarabombang sejauh 15,7 km dan jarak ke pusat kabupaten sejauh 23,3 km. Sebagian kondisi jalan desa ini beraspal dan sebagian lagi masih tanah berbatu. Desa Bontomaranu adalah desa nelayan (90%), namun desa ini tidak memiliki infrastruktur yang menunjang kegiatan penangkapan. Kondisi jalan utama Desa Bontomaranu adalah tanah padat dan sepanjang jalan dusun nelayan jalan berpasir. Jarak Desa Bontomaranu dengan kecamatan sejauh 3,2 km sedangkan jarak desa dengan kabupaten sejauh 19 km. Infrastruktur yang dimiliki Desa Boddia untuk kegiatan penangkapan yaitu Tempat Pelelangan Ikan dan SPDN (*Solar Packet Dealer* untuk Nelayan). Bangunan TPI yang ada tidak berfungsi sebagaimana mestinya dan sekarang menjadi bangunan rusak. SPDN yang ada di desa ini merupakan unit usaha koperasi nelayan, namun saat ini dikelola secara pribadi oleh individu dan tidak memberikan kontribusi bagi koperasi. Desa Boddia juga memiliki pelabuhan kecil yang lokasinya dekat dengan TPI, pelabuhan tersebut berfungsi sebagai jalur penyeberangan masyarakat Pulau Tanakeke yang ingin beraktivitas di Kabupaten Takalar. Infrastruktur untuk pengembangan wisata bahari di Pulau Sanrobengi yaitu air bersih dan penginapan (dalam taraf pembangunan). Jarak desa Boddia dengan kecamatan sejauh 0 km sedangkan jarak desa dengan kabupaten sejauh 18 km.

KERAGAMAN DAN PERMASALAHAN PADA USAHA PERIKANAN

Usaha perikanan yang dilakukan masyarakat desa-desa perikanan di Kabupaten Takalar hanya sebatas penangkapan dan budidaya saja (terutama rumput laut dan tambak). Belum ada aktivitas pengolahan perikanan yang dapat menambah nilai komoditas. Seluruh hasil tangkapan masih dijual dalam bentuk segar.

Usaha budidaya rumput laut di Desa Laikang juga mengalami permasalahan yaitu penyakit *ice-ice* yang belum teratasi, selama ini pembudidaya hanya melakukan tindakan 'pemotongan' saja (memotong rumput laut yang terkena penyakit). Permasalahan perikanan tangkap di Desa Bontomarannu dan Desa Boddia terkait dengan pemanfaatan yaitu penggunaan mesin kapal yang masih berkapasitas rendah, alat tangkap (jaring) yang kurang luas mengakibatkan pemanfaatan sumber daya perikanan kurang optimal dan tidak adanya teknologi pendukung seperti *fish finder* dan radar untuk pengembangan usaha penangkapan. Permasalahan penangkapan di Desa Batu-Batu yaitu banyaknya praktek penangkapan ikan dengan cara merusak (pengeboman, bus dll).

Hampir semua kegiatan perikanan di Kabupaten Takalar belum ada kegiatan pengolahan untuk efek pengganda ekonomi. Seluruh hasil produksi perikanan masih dijual dalam bentuk segar sedangkan untuk rumput laut dalam bentuk kering dan garam dijual tanpa perlakuan (krosok). Belum ada kegiatan pengolahan (produk turunan) untuk hasil produksi. Masyarakat sudah dikenalkan teknologi pengolahan perikanan, namun belum diketahui distribusi pemasarannya. Berbeda kasus di desa Boddia yang tidak mengadopsi pengenalan pengolahan ikan karena harga jual olahan tidak memberikan nilai tambah, untuk itu perlu terobosan teknologi yang mampu menambah nilai ekonomis hasil tangkapan nelayan.

KEMITRAAN DAN KELEMBAGAAN USAHA PERIKANAN

Kelembagaan usaha perikanan yang dibentuk harus bisa bersinergi dengan masyarakat

dalam memanfaatkan teknologi yang ada. Selain itu, kelembagaan tersebut juga perlu memberi ruang partisipasi pelaku usaha dalam berperan aktif dalam aktifitas lembaga dan pengambilan kebijakan. Ada beberapa kriteria yang sebaiknya diperhatikan dalam membentuk kelembagaan di Kabupaten Takalar; 1) Wilayah pesisir yang mempunyai potensi perikanan yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ekonomi lokal; 2) bersinergi dengan program kelautan dan perikanan di Kabupaten Takalar; 3) Memiliki potensi unggulan sebagai basis pengembangan ekonomi masyarakat. 4) masyarakat terbuka terhadap perubahan dan mudah bekerjasama dengan pihak luar (Zulham, 2012).

Kelembagaan sosial ialah suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat kepada aktivitas – aktivitas untuk memenuhi kompleks – kompleks kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat (Koentjaraningrat, 1964). Kelembagaan sosial juga dimaknai sebagai himpunan norma-norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat (Soekanto, 2007). Fungsi kelembagaan sosial adalah: 1) Memberi pedoman berperilaku kepada individu/ masyarakat; 2) Menjaga keutuhan; dan 3) Memberi pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan kontrol sosial.

Masyarakat Kabupaten Takalar pada umumnya membentuk kelembagaan atas inisiasi pemerintah lokal sebagai wadah untuk penyaluran bantuan pemerintah. Kelembagaan berbentuk kelompok dibentuk atas dasar kesamaan jenis usaha seperti nelayan dan pembudidaya. Sementara secara fungsional kelembagaan tidak berjalan sebagai wadah kelompok untuk saling berinteraksi (Stiglitz, 1986) dalam kegiatan usaha terlebih untuk berkordinasi dalam mengembangkan budidaya pada kawasan mereka.

Kerjasama dan sinkronisasi antar SKPD terkait program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir. Beberapa SKPD seperti Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Koperasi dan usaha kecil menengah (UKM), Dinas pekerjaan umum dan pariwisata, lembaga pemberdayaan masyarakat pedesaan (LPMD)

serta lembaga pemberdayaan masyarakat desa (LPMT) sebaiknya membuat komitmen untuk mensinergikan program kerja (Gambar 2).

Beberapa kegiatan hasil sinergi antar SKPD yang dilaksanakan di Teluk Laikang antara lain; 1) perbaikan seluruh akses jalan di Desa Laikang, 2) pengadaan penjemuran (para-para) sebanyak 10 unit yang tersebar di 3 dusun, 3) pengadaan lantai jemur rumput laut, 4) pengadaan Demplot *caulerva* (law-lawi), 5) bantuan calon induk Lobster sebanyak 300 kg pada kelompok JULUKANAYA, 6) bantuan bibit udang dan bandeng yang diberikan pada kelompok PABIRING sebanyak 300.000 ekor, 7) pembuatan sabun dan pasta gigi rumput laut yang merupakan kegiatan uji coba yang dilakukan kelompok MUTIARA PUTIH.

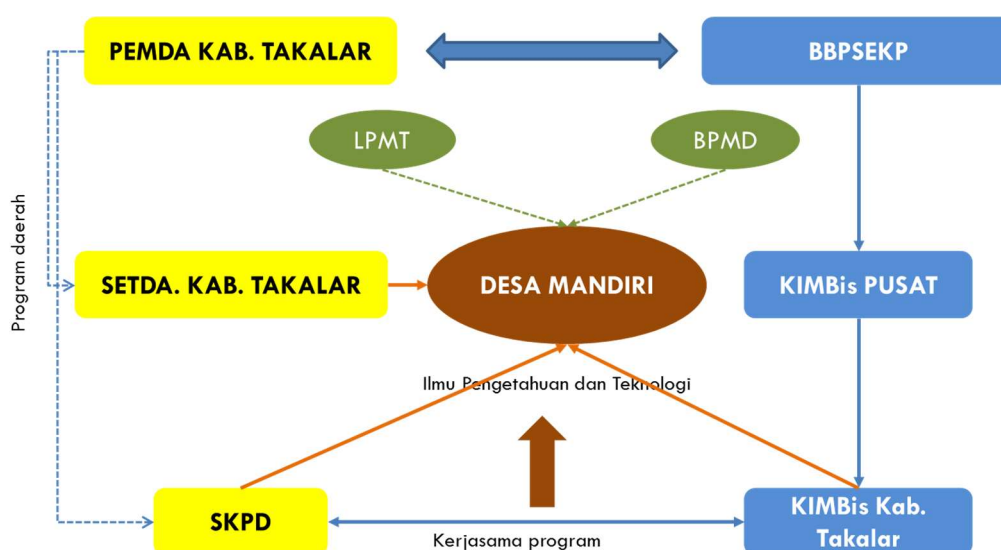
Pembentukan koperasi merupakan tindak lanjut upaya pembinaan kelompok usaha yang berada dalam binaan KIMBis Takalar. Seluruh kelompok binaan KMIBis akan menjadi binaan koperasi BERINGIN INDAH. Koperasi yang didirikan ini adalah Koperasi Serba Usaha (KSU) yang memungkinkan adanya pengembangan usaha lain. Koperasi ini diberi nama BERINGIN INDAH dengan jumlah anggota sebanyak 60 orang. Bidang usaha yang sudah dirintis adalah:

- 1) Penjualan kebutuhan petani rumput laut

berupa tali, pelampung dan bibit rumput laut; 2) Penjualan rumput laut kering secara bersama; 3) Pelayanan kegiatan wisata di Teluk Laikang; 4) Penjualan produk hasil perikanan berupa stick rumput laut dan sabun rumput laut; 5) Pembesaran dan penjualan lobster; 6) Budidaya dan penjualan caulerva (lawi-lawi); 7) Penjualan hasil udang vaname hasil tambak.

PENUTUP

Kabupaten Takalar memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan, namun belum tercatat dengan baik dalam buku statistik. Potensi yang dimiliki Kabupaten Takalar meliputi perikanan tangkap (pelagis kecil, rajungan, kakap, kerapu dll), perikanan budidaya (laut: rumput laut, payau: udang, bandeng dan rumput laut, tawar: nila, lele, gurami dll), produk kelautan (garam dan wisata bahari). Potensi tersebut telah dimanfaatkan oleh masyarakat dan pemerintah untuk kebutuhan perekonomiannya, namun belum optimal. Hal tersebut dapat dilihat pada penggunaan teknologi perikanan yang masih dilakukan secara sederhana. Pada perikanan tangkap menggunakan teknologi mesin kapal dibawah 5 GT dan sistem penangkapan *one day fishing*. Pada perikanan budidaya laut dan tawar menggunakan sistem budidaya tradisional, begitu juga budidaya air payau



Gambar 2. Model Kerjasama KIMBis dan SKPD dalam Rangka Implementasi Program Desa Mandiri di Kabupaten Takalar.

Sumber: Data Primer diolah

menggunakan sistem budidaya tradisional yang sebelumnya telah menggunakan sistem semi intensif.

Permasalahan penyakit pada rumput laut, pengelolaan pendapatan rumah tangga, penggunaan alat tangkap yang kurang ramah lingkungan serta kualitas sumber daya manusia yang masih mempengaruhi dalam usaha perikanan. Salah satu buktinya terjadi pada proses pembentukan kelembagaan dan pengelolaan lembaga, baik kelompok pembudidaya maupun kelompok-kelompok masyarakat lain yang terkait dengan aktifitas perikanan.

Berdasarkan kompleksitas usaha perikanan seperti yang dijelaskan di atas, maka penguatan kelembagaan bisnis perlu diprioritaskan untuk meningkatkan nilai tambah produk perikanan lokal. Kimbis menginisiasi dalam penguatan kelembagaan dengan bekerjasama dengan *existing* lembaga-lembaga yang ada di desa, pemerintah daerah dan masyarakat desa secara individual. Arah pengembangan lembaga bisnis ini adalah pembentukan koperasi perikanan yang dapat mengelola semua unit usaha yang ada di tingkat desa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Muhammad Kasim dan semua pihak yang telah membantu selama proses interview dan pengumpulan data di lapang. Ucapan terima kasih kepada kegiatan Klinik Iptek Mina Bisnis yang telah berkontribusi terlaksananya riset ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2013. Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Takalar 2012. Kabupaten Takalar. Sulawesi Selatan.
- _____. 2013. Kabupaten Takalar Dalam Angka 2013. Kabupaten Takalar. Sulawesi Selatan.
- _____. 2013. Kecamatan Mangarabombang Dalam Angka 2013. Kabupaten Takalar. Sulawesi Selatan.

- _____. 2013. Kecamatan Mapakkasunggu Dalam Angka 2013. Kabupaten Takalar. Sulawesi Selatan.
- _____. 2013. Kecamatan Galesong Dalam Angka 2013. Kabupaten Takalar. Sulawesi Selatan.
- _____. 2013. Kecamatan Galesong Selatan Dalam Angka 2013. Kabupaten Takalar. Sulawesi Selatan.
- Dinas Kelautan dan Perikanan. 2014. Data Statistik Perikanan Budidaya Tahun 2013. Kabupaten Takalar. Sulawesi Selatan.
- Koentjaraningrat. 1964. Pengantar Antropologi. Jakarta. Penerbit Universitas Indonesia
- Soerjono, S. 2007. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta. Rajawali Pers.
- Kartasasmita, G. 1996. Pemberdayaan: Konsep Pembangunan Yang Berakar pada Masyarakat. Bandung: ITB Press.
- Karsidi, R. 2001. Memilih Penelitian yang Memberdayakan Masyarakat. Disampaikan dalam Seminar dan Lokakarya Penelitian di UNIBA Solo, 20 Oktober 2001.
- Koentjaraningrat. 1964. Pengantar Antropologi. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia
- Pomeroy, R.S. and R. Rivera-Guieb. 2006. Fishery co-management: a practical handbook. Oxford: CABI Publishing.
- Prijono, O.S dan A.M.W Pranarka. 1996. Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi. Jakarta: CSIS.
- Rahmat, D. 2005. Metode Penelitian Komunikasi. Bandung: RosdaKarya.
- Soerjono, S. 2007. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers.
- Stiglitz J.E. 1986. Economics of Information and the Theory of Economic Development. NBER Working Papers 1566, National Bureau of Economic Research, Inc.
- Sumodiningrat, G. 1999. Pemberdayaan Masyarakat dan JPS. Jakarta: PT Gramedia Pustaka.
- Zulham, A. 2012. Modul Penguatan Kapasitas Kelembagaan KIMBis. Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan-KKP.

SALURAN, MARGIN DAN EFISIENSI PEMASARAN RUMPUT LAUT DI SENTRA KAWASAN MINAPOLITAN KABUPATEN SUMBAWA

Seaweed Marketing Channels, Margin and Efficiency in The Minapolitan Area of Sumbawa District

***Hikmah¹ dan Agus Heri Purnomo²**

¹Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
Gedung BRSDMKP KP I Lt. 4

Jalan Pasir Putih Nomor 1 Ancol Timur, Jakarta Utara
Telp: (021) 64711583 Fax: 64700924

²Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan
JL. KS Tubun, Petamburan VI, Slipi, Jakarta Pusat

*email: hikmah_madani@yahoo.com

Diterima tanggal: 10 Juli 2017 Diterima setelah perbaikan: 9 November 2017

Disetujui terbit: 7 Desember 2017

ABSTRAK

Komoditas rumput laut merupakan salah satu komoditas yang mampu meningkatkan ekonomi masyarakat, menyerap tenaga kerja dan meningkatkan devisa, namun mengalami permasalahan pada aspek pemasaran terutama menyangkut lembaga, saluran, dan jaringan serta pola pemasaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola saluran, margin dan efisiensi pemasaran yang diperoleh masing-masing lembaga. Data dikumpulkan dengan observasi dan wawancara, di mana populasi dalam penelitian ini adalah pembudiaya rumput laut, pengumpul rumput laut, eksportir dan industri pengolahan rumput laut di daerah Kabupaten Sumbawa. Pemilihan sampel (responden) pembudidaya rumput laut digunakan metode *purposive sampling*, sedangkan sampel pedagang digunakan metode *snowball sampling*. Analisis data menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif berdasarkan analisis biaya dan margin pemasaran serta perhitungan pangsa (*farmer's share*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola saluran pemasaran rumput laut di sentra kawasan minapolitan Kabupaten Sumbawa terbagi menjadi tiga, dimana saluran pemasaran saluran 1 lebih panjang dibanding saluran pemasaran 2 dan 3. Saluran yang paling efisien terjadi pada saluran pemasaran 2 dimulai dari pembudidaya dijual ke pengumpul lokal 2 diteruskan pedagang besar di Lombok kemudian ke eksportir Surabaya dan berakhir di pabrik mancanegara. Pada saluran ini merupakan saluran yang relatif lebih pendek dan margin yang kecil 13,3 % atau Rp. 1000,- (per kilogram) serta nilai *farmer's share* (86,67 %) yang paling besar dibanding saluran 1 dan 2. Untuk itu, perlu dukungan kebijakan untuk menguatkan saluran pemasaran 2 dengan meningkatkan keberpihakan terhadap pembudidaya rumput laut yang tercermin dari besaran *farmer's share*.

Kata Kunci: saluran pemasaran; margin; efisiensi rumput laut

ABSTRACT

Seaweed is a commodity that could improve the community economic, absorb labor and increase foreign exchange. However, problems occur in marketing particularly related to institutions, channels, networks and marketing patterns. This study aims to determine the channel patterns, margins and marketing efficiency obtained by each institution. Data was collected by observations and interviews toward seaweed growers, seaweed collectors, exporters and seaweed processing industries in the Sumbawa Regency. Samples (respondents) of seaweed cultivators were selected using purposive sampling method, while the merchant samples were selected using snowball sampling method. Quantitative descriptive approach was used to analyzed the data based on analysis of marketing costs and margins as well as share calculations (farmer's share). The study suggests that the seaweed marketing channel pattern in minapolitan area of Sumbawa Regency was divided into three, where marketing channel 1 were longer than marketing channel 2 and 3. The most efficient channel occurred in marketing channel 2 starting from farmers to local collectors 2, forwarded to wholesalers in Lombok, then to Surabaya exporters and ended up in foreign factories. This is a relatively shorter channel with small margin of 13.3% or Rp. 1000, - (per kilogram) and has the highest value of farmer's share (86.67%) compared to channel 1 and 2. Therefore, policy is necessary to strengthen marketing channel 2 by supporting seaweed farmers as reflected in farmer's share percentages.

Keywords: marketing channels; margin; seaweed efficiency

¹Korespondensi Penulis:

Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
Gedung Balitbang KP I Lt. 4 Jalan Pasir Putih Nomor 1 Ancol Timur, Jakarta Utara, Indonesia
Telp: (021) 64711583 Fax: 64700924

PENDAHULUAN

Komoditas rumput laut merupakan salah satu komoditas yang mampu meningkatkan ekonomi masyarakat, menyerap tenaga kerja dan meningkatkan devisa negara. Pemanfaatan rumput laut dewasa ini semakin luas dan beragam, karena peningkatan pengetahuan akan komoditas ini. Umumnya rumput laut banyak digunakan sebagai bahan makanan bagi manusia, sebagai bahan obat-obatan (*anticoagulant*, *antibiotics*, *antimehmetes*, *antihypertensive agent*, pengurang kolesterol, *dilatory agent*, dan insektisida). Rumput laut juga banyak digunakan sebagai bahan pakan organisme di laut, sebagai pupuk tanaman dan penyubur tanah, sebagai pengemas transportasi yang sangat baik untuk lobster dan *clam* hidup (khususnya dari jenis *Ascophyllum* dan *focus*), sebagai stabilizer larutan, dan juga kegunaan lainnya. Perkembangan produk turunan dewasa ini juga sudah banyak diolah menjadi kertas, cat, bahan kosmetik, bahan laboratorium, pasta gigi, es krim, dan lain-lain (Indriani dan Suminarsih, 1999).

Perkembangan produksi rumput laut pada tahun 2010 mencapai 3.915.016 ton dan naik rata-rata 34,21 % dari tahun 2005, kenaikan tertinggi dibanding dengan komoditas lainnya. Dari total produksi nasional, Kabupaten Sumbawa merupakan produsen rumput laut terbesar yang kedua di Indonesia. Produksi rumput laut di Kabupaten Sumbawa terus meningkat dari tahun 2007 yakni sebesar 75.509 ton menjadi 162.411 ton dengan kenaikan rata-rata 31,80 % (DJP2HP, 2012).

Permasalahan pada pengembangan rumput laut sering terjadi pada aspek pemasaran yaitu aspek kelembagaan, jaringan pemasaran, dan kesenjangan komunikasi antara produsen dan penggunaannya. Panjangnya rantai pemasaran rumput laut menyebabkan margin yang diterima pembudidaya relatif masih kecil (Hikmayani, *et.al.*, 2005). Pemasaran rumput laut yang cukup panjang mempengaruhi efisiensi pemasaran (Anggadireja, 2008). Oleh karena itu, makalah ini bertujuan mengetahui tentang saluran pemasaran rumput laut, biaya, keuntungan, margin pemasaran dan efisiensinya.

Penelitian menggunakan metode survey di Kabupaten Sumbawa pada bulan Maret 2012. Data primer yang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan penyelidikan yang sedang ditangani (Maholtra, 1996), diperoleh melalui observasi langsung di lapangan dan wawancara dengan beberapa pelaku usaha yang ditentukan secara *purposive sampling* (Singarimbun dan Effendi, 1995) dan *snowball sampling* (Juanda, 2009). Data sekunder berupa buku, dokumen, data, laporan, artikel, jurnal yang terkait dengan usaha budidaya rumput laut, perdagangan rumput laut, perkembangan harga rumput laut serta industri pengolahan rumput laut yang diperoleh melalui instansi dan lembaga terkait serta melalui kajian pustaka. Selanjutnya dilakukan analisis biaya dan margin pemasaran (*cost margin analysis*) (Tomek and Robinson, 1990) dan analisis efisiensi pemasaran (Pursell, 1979).

KARAKTERISTIK LEMBAGA PEMASARAN

Pemasaran adalah semua keragaan dari kegiatan bisnis yang termasuk dalam penyaluran produk dan jasa mulai dari titik nol sampai ke tangan konsumen (Kohl dan Uhl, 1990). Lembaga pemasaran berfungsi pemasaran untuk memperlancar proses perpindahan barang dan/ atau jasa. Fungsi pemasaran yang dilakukan perorangan atau kelompok pada dasarnya terbagi menjadi tiga, yaitu: fungsi pertukaran, fungsi fisik, dan fungsi fasilitas. Fungsi lembaga yang terlibat dalam pemasaran rumput laut berbeda-beda. Lembaga pemasaran yang terlibat dalam saluran pemasaran di kawasan sentra minapolitan adalah: pembudidaya rumput laut, pedagang lokal (pengumpul lokal 1 dan 2), pedagang pengumpul besar (pengumpul Kabupaten dan pedagang cabang eksportir) dan pengolah Kabupaten Sumbawa.

1. Pembudidaya Rumput Laut

Pembudidaya sebagai produsen rumput laut di Sumbawa. Mayoritas pembudidaya di Sumbawa juga bertindak sebagai pembibitan, sehingga mereka tidak perlu untuk memasok bibit dari luar karena mereka sering cukup memilah benih dari budidaya sendiri untuk diregenerasi kembali ke dalam benih berikutnya, dan atau dijual kembali dalam bentuk basah.

2. Pedagang

a. Pedagang Pengumpul Lokal (di Tingkat Desa)

Pedagang pengumpul lokal rumput laut terdiri dua jenis yaitu:

- **Pedagang Pengumpul Lokal 1:** umumnya masih berskala usaha kecil yang berperan menampung panen dari para pembudidaya di tingkat desa. Pedagang pengumpul lokal 1 sebagian besar berperan sebagai perantara. Hampir semua pedagang pengumpul lokal I juga merupakan pembudidaya rumput laut. Pedagang pengumpul lokal I melakukan pembelian secara langsung kepada pembudidaya rumput laut dan transaksi dilakukan secara langsung di rumah pembudidaya. Pedagang pengumpul desa bertugas mencari rumput laut kering dari pembudidaya, kemudian melakukan pembelian dan pembayaran. Selanjutnya para pedagang ini menyetorkan rumput laut kering ke pedagang besar cabang eksportir yang ada di Kabupaten Sumbawa. Penyetoran dilakukan seminggu sekali dengan kapasitas rata-rata 700 – 750 kg per minggu, namun apabila musim sedang bagus kapasitas setor bisa mencapai 3 ton per 1 orang pedagang pengepul lokal 1.

Pedagang pengumpul lokal 1 tidak mengeluarkan biaya karena semuanya ditanggung pedagang pengumpul besar. Fungsi pedagang pengumpul lokal I adalah: (1) fungsi pertukaran berupa pembelian dan penjualan; (2) fungsi fisik berupa pengangkutan; dan (3) fungsi fasilitas berupa penanggungan resiko, yaitu tersendatnya pembayaran dari pedagang pengumpul besar. Proses pembayaran dilakukan di rumah pembudidaya secara tunai atau tempo dengan jangka waktu satu sampai beberapa hari, tergantung kepercayaan pembudidaya dan keuangan pedagang.

- **Pedagang Pengumpul Lokal 2;**

Hampir sama dengan pedagang pengumpul lokal 1, fungsi dan peranan pedagang pengumpul lokal 2 adalah menampung panen rumput laut dari pembudidaya.

Bedanya adalah modal untuk pembelian menggunakan modal sendiri, bukan dari pedagang besar. Pembudidaya rumput laut yang biasa menjadi langganan pedagang pengumpul 2 merupakan kelompok-kelompok pembudidaya binaan dinas kelautan dan perikanan setempat. Namun terkadang juga menampung dari pengumpul lokal 1 yang ada di Kabupaten Sumbawa. Terdapat sekitar 5 kelompok pembudidaya tetap yang selalu menyetorkan hasil panennya ke pedagang pengumpul lokal 2 ini. Selanjutnya disalurkan ke pedagang besar di Lombok dengan volume penjualan hingga 18 ton per bulan.

b. Pedagang Pengumpul Besar

- **Pedagang Pengumpul Besar Antar Provinsi**

Kabupaten Sumbawa terdapat dua pedagang besar yaitu pedagang antar provinsi. Pedagang pengumpul besar yang bertindak sebagai gudang pengumpul hasil budidaya rumput laut yang dibeli dari para pengumpul lokal di wilayah Sumbawa untuk kemudian dilakukan proses penjemuran, penyortiran, penimbangan, dan *packaging* yang kemudian di kirim ke eksportir yang berada di Surabaya.

- **Pedagang Besar Cabang Ekportir (Perusahaan)**

Pedagang besar cabang eksportir berfungsi sebagai penampung skala besar dari pengumpul-pengumpul kecil. Pedagang pengumpul besar cabang eksportir menanggung resiko penyusutan maupun kerusakan barang saat penyortiran maupun selama perjalanan. Selain resiko penyusutan, resiko yang ditanggung adalah tidak dibayarnya barang dagangan oleh pembeli. Fungsi pemasaran yang dilakukan oleh pedagang pengumpul besar adalah: (1) Fungsi pertukaran berupa pembelian dan penjualan; (2) Fungsi fisik berupa pengangkutan dan penyimpanan; dan (3) Fungsi fasilitas berupa penyortiran dan *grading*, sumber informasi pasar, sumber pembiayaan, dan penanggungan resiko.

Pembayaran oleh pedagang pengumpul lokal 1 dan 2 kepada pembudidaya dilakukan secara tunai. Selanjutnya pembayaran dari pedagang besar kabupaten dan cabang eksportir kepada pedagang pengumpul lokal 1 dan 2 dilakukan secara tempo hingga beberapa hari tergantung kesepakatan dan tingkat kepercayaan. Terdapat sekitar 15 pengumpul tetap yang menyetorkan rumput laut ke pedagang besar cabang ekportir yang ada di Kabupaten Sumbawa.

Struktur dalam perusahaan cabang eksportir terdiri dari kepala gudang, supir, dan penjaga keamanan yang dibayar dengan sistem gaji bulanan, sementara tenaga kerja bongkar muat, tenaga kerja penjemuran, serta tenaga kerja *processing* dan pengepakan yang dibayar berdasarkan upah pengerjaan per karung rumput laut yang seluruhnya di bayar oleh perusahaan eksportir pusat di Surabaya.

Frekuensi pengiriman rumput laut laut kering ke Surabaya dalam 1 bulan rata-rata sekitar 4-6 kali, dengan rata-rata volume pengiriman per minggu sekitar 18 Ton. Sistem pembelian rumput laut yaitu dengan membeli langsung dari pembudidaya dengan harga Rp.7500/kg melalui perantara pengumpul (pengumpul lokal 1) yang mendapat upah sekitar Rp.500/kg.

Dalam menjalankan fungsi-fungsi pemasaran, masih terdapat permasalahan-permasalahan pemasaran yang dapat

mengurangi nilai produk yang dipasarkan. Sebagai contoh rumput laut yang diperjualbelikan adalah rumput laut yang tingkat kekeringannya dibawah standar minimal 70% (kering karet). Rumput laut kering diperjual belikan dalam satu kelompok tanpa pembedaan kelas-kelas tertentu (*grading*). Tidak ada standar yang baku tentang kualitas komoditi yang diperjualbelikan, misalnya rumput laut yang proses penjemurannya dilakukan menggunakan para-para terjamin kebersihannya dengan yang rumput laut yang dijemur di atas pasir harganya tetap sama.

Kondisi ini sering menjadi permasalahan pemasaran yang umum terjadi dinegara-negara berkembang. Seperti yang dinyatakan oleh Harrison (1988), masalah-masalah pemasaran di sektor pertanian termasuk perikanan antara lain; banyaknya pedagang perantara yang terlibat, tingginya susut, praktek spekulasi dan monopsoni oleh perantara, pinjaman perantara yang mengarah pada harga yang tidak wajar terhadap hasil yang diterima pembudidaya, tidak cukupnya informasi pasar dan tidak adanya standarisasi dan *grading*.

POLA SALURAN PEMASARAN

Pola saluran pemasaran rumput laut di Kabupaten Sumbawa terdiri dari tiga saluran. Dari ketiga saluran tersebut, dua saluran bermuara ke perusahaan eksportir di luar daerah untuk dipasarkan kembali ke pasar internasional, yakni Hongkong, Cina dan satu

Tabel 1. Fungsi-Fungsi Lembaga Pemasaran Rumput Laut Kering dari Sentra Kawasan Minapolitan, Kabupaten Sumbawa, 2012.

Fungsi-fungsi	Pembudidaya	Pedagang			Pengolah
		Pengumpul lokal 1	Pengumpul lokal 2	Pengumpul Besar	
Pertukaran					
- Pembelian	Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya
- Penjualan	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
- Penyimpanan	Tidak	Tidak	Ya	Ya	Ya
- Pengangkutan	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
- Pengolahan	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
Fasilitas					
- Penyortiran	Ya	Tidak	Ya	Ya	Ya
- Penaggungan resiko	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
- Informasi pasar	Ya	Tidak	Ya	Ya	Ya
- Pembiayaan	Ya	Tidak	Ya	Ya	Ya

saluran bermuara ke industri makanan olahan di pasar lokal (Sumbawa) dan luar daerah (Mataram dan Surabaya). Ketiga saluran tersebut adalah sebagai berikut:

Pola Saluran 1

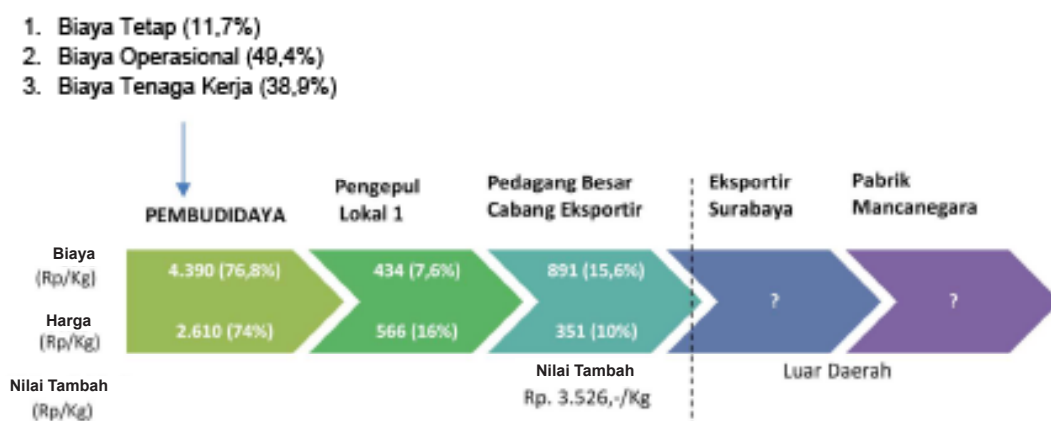
Sistem pemasaran ini cukup banyak dilakukan oleh pembudidaya di Kabupaten Sumbawa. Dalam perdagangan rumput laut kering dari pembudidaya ke pengumpul lokal I sampai ke pedagang besar cabang eksportir ini pembudidaya menjual rumput laut kering kepada pengumpul lokal I di lokasi budidaya atau di lokasi pengumpul tanpa melakukan klasifikasi. Saluran nilai rumput laut kering dari pembudidaya ke pengumpul lokal I dapat dilihat pada Gambar 1.

Saluran ini menghasilkan laba/pertambahan nilai sebesar Rp. 3.526,- per kg rumput laut kering dengan biaya untuk menghasilkan pertambahan nilai sebesar Rp. 5.715,- per kg. Dari jumlah laba/pertambahan nilai, pembudidaya menerima bagian terbesar, yaitu 74%, dan menghabiskan bagian terbesar di sisi biaya (76,8%). Pembudidaya rumput laut menghabiskan sebagian besar dari biaya tersebut untuk biaya penyusutan asset (tali ris, tali pengikat, tali jangkar, tali induk, jangkar induk, jangkar samping, pelampung botol, pelampung sudut, perahu, mesin, para-para), biaya operasional (Bibit rumput laut dan BBM), tenaga kerja (pengikat bibit, pemeliharaan, panen, dan pengikat tali ris), dan biaya lainnya yang dibutuhkan untuk menghasilkan

produk. Pembiayaan paling besar yang dikeluarkan oleh pembudidaya rumput laut ini adalah untuk biaya operasional, yakni rata-rata sebesar 49,4% dari total biaya.

Pada saluran pemasaran pedagang pengumpul I kemudian ke perusahaan pengumpul besar cabang eksportir biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan pertambahan nilai hanya sedikit. Oleh karena itu, pertambahan nilai yang dihasilkan adalah kecil. Lebih lanjut, terlihat bahwa pengumpul lokal mengeluarkan biaya paling kecil yaitu sebesar 7,6% sedangkan laba/pertambahan nilai yang dihasilkan oleh pengumpul kecil justru lebih besar (16%) dibanding dengan pertambahan nilai yang dihasilkan oleh pengumpul besar cabang eksportir yang hanya mendapat sebesar 10%, padahal biaya yang dikeluarkan lebih besar dari pengumpul lokal (15,6%). Hal ini dikarenakan perusahaan cabang eksportir lebih mengedepankan kuantitas volume penjualan, sehingga walaupun untung per kilogram yang diterima sedikit namun dengan volume besar maka keuntungan yang didapat juga semakin besar. Di sisi lain, perusahaan cabang eksportir ini juga hanya merupakan anak buah dari perusahaan eksportir besar di luar daerah, yakni Surabaya, yang menggunakan sistem gaji terhadap para tenaga kerjanya.

Saluran pemasaran rumput laut dari Kabupaten Sumbawa ini kemudian berlanjut ke luar daerah, dimana pengumpul besar cabang eksportir kemudian menyetorkan penjualannya ke perusahaan eksportir pusat di Surabaya.



Gambar 1. Pola Saluran Pemasaran Rumput Laut 1

Dari perusahaan eksportir di Surabaya kemudian diekspor ke pasar mancanegara, biasanya berupa pabrik pemroses yang ada di Hongkong, Cina.

Pola Saluran 2

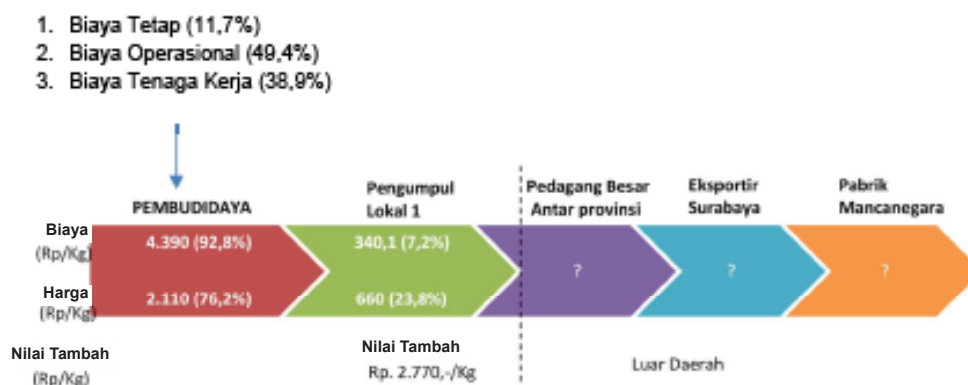
Saluran pemasaran melalui pengumpul lokal 2 ini juga bermuara ke eksportir, hanya saja melalui jalur yang berbeda. Untuk saluran ini dari Sumbawa rumput laut dikirim dahulu ke pengumpul besar di Lombok untuk kemudian disetorkan lagi ke eksportir pusat di Surabaya. Dari Surabaya kemudian diekspor ke pabrik pemroses mancanegara. Pembudidaya menjual rumput laut kering kepada pengumpul lokal 2 di lokasi pengumpul tanpa melakukan klasifikasi. Pengumpul 2 ini kemudian membuat kesepakatan harga dengan pedagang besar di luar daerah, yakni pedagang besar di daerah Lombok. Alasan menjual ke pedagang selanjutnya ini dikarenakan prinsip kemitraan, dimana pedagang besar ini terkadang (walaupun tidak selalu) bisa memberikan pinjaman modal kepada pengumpul lokal untuk kemudian dipinjamkan kembali kepada pembudidaya yang kekurangan modal. Oleh karena hal ini, beberapa pembudidaya yang telah meminjam modal kepada pengumpul lokal harus mengembalikan pinjamannya dengan cara menjual hasil panennya ke pengumpul lokal tersebut. Saluran nilai rumput laut kering dari pembudidaya ke pengumpul lokal II:

Keseluruhan saluran tersebut menghasilkan pertambahan nilai sebesar Rp.2770,- per kg rumput laut kering dan jumlah biaya yang dihabiskan untuk menghasilkan

pertambahan nilai dari pembudidaya ke pengumpul lokal adalah Rp. 4730,- per kg rumput laut kering. Hampir sama dengan jalur pemasaran melalui pengumpul lokal I, dalam saluran ini, dari jumlah pertambahan nilainya pembudidaya juga menerima bagian terbesar, yaitu 92,8 % dari total pertambahan nilai dan menghabiskan bagian terbesar di sisi biaya (76,2%). Dibandingkan dengan pemasaran ke pengumpul lokal I, pertambahan nilai yang dihasilkan melalui pemasaran rumput laut ini bernilai lebih sedikit. Hal ini dikarenakan saluran nilai yang berlangsung melalui pengumpul lokal II di Kabupaten Sumbawa ini juga lebih pendek dari saluran I karena proses pemasarannya langsung dilanjutkan ke pengumpul besar diluar daerah yaitu daerah Lombok.

Pola Saluran 3

Selain ke pedagang pengumpul, pembudidaya juga menjual rumput laut kering kepada *home industry* pengolahan rumput laut. Penjualan tersebut dilakukan di lokasi pembudidaya dengan melakukan klasifikasi kualitas rumput laut. Sebagian besar perusahaan industri makanan yang mengolah rumput laut di Kabupaten Sumbawa masih termasuk ke dalam kategori usaha kecil dan menengah (UKM) dan skala rumah tangga. Industri ini memasok kebutuhan bahan baku rumput laut mereka langsung dari para pembudidaya di desa terdekat. Dengan memasok langsung dari pembudidaya maka kualitas rumput laut bermutu yang dibutuhkan dapat diperoleh dengan lebih mudah. Oleh karena kebutuhan rumput laut yang dibutuhkan kualitasnya harus



Gambar 2. Pola Saluran Pemasaran Rumput Laut 2

bagus maka seringkali pembudidaya mematok harga yang lebih mahal dari harga standar. Disini pembudidaya bisa dengan bebas menentukan harga tanpa mengikuti harga pasaran dengan syarat adanya kesepakatan dengan pihak pembeli, yakni pengolah itu sendiri. Saluran pemasaran rumput laut kering dari pembudidaya perusahaan pengolahan dodol rumput laut disajikan pada Gambar 3.

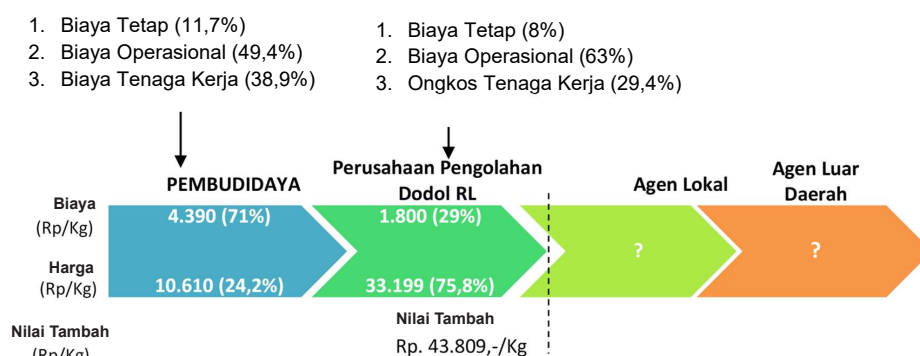
Dalam saluran nilai ini pertambahan nilai yang didapat dari *home industry* pengolahan dodol rumput laut yang ada di Kabupaten Sumbawa. Saluran untuk *home industry* makanan olahan ini menghasilkan pertambahan nilai yang lebih besar dibanding dengan saluran nilai lain, yakni sebesar Rp.45.000,- per kg rumput laut olahan, dengan jumlah biaya untuk menghasilkan pertambahan nilai sebesar Rp. 6191,- per kg. Dari jumlah pertambahan nilai tersebut, pengolah (*prozessor*) makanan olahan berbahan baku rumput laut, yakni pengolah dodol rumput laut mendapatkan bagian tertinggi dari pertambahan nilai yaitu sebesar 75,8% dari total pertambahan nilai dalam saluran.

Sedangkan dari segi biaya pembudidaya tetap menjadi pihak yang mengeluarkan biaya terbesar untuk usaha budidayanya, yakni sebesar 71%. Di sisi lain, pengolah dapat melakukan efisiensi dimana dengan biaya yang lebih rendah dari pembudidaya, pengolah dapat menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Setelah diproses oleh pengolah dodol rumput laut, hasil produksi kemudian dipasarkan melalui agen-agen dan minimarket lokal (Sumbawa) dan luar daerah yaitu Mataram, serta dikirim ke distributor di Surabaya.

MARGIN DAN EFISIENSI SALURAN PEMASARAN

Margin adalah suatu istilah yang digunakan untuk menyatakan perbedaan harga yang dibayar kepada penjual pertama dan harga yang dijual pada pembeli terakhir. Tabel 3 menunjukkan bahwa margin terbesar terdapat pada saluran pemasaran III, yakni sebesar Rp 35.000/Kg. Hal ini dikarenakan saluran pemasaran 3 adalah saluran pemasaran dalam bentuk produk olahan dan rantai pemasarannya pendek sehingga margin dan nilai tambah yang dihasilkan jauh lebih besar dibandingkan saluran 1 dan 2. Sementara saluran pemasaran I dan II rumput laut yang dipasarkan dalam bentuk kering/*raw material* saja. Pada saluran pemasaran rumput laut dalam bentuk kering (*raw material*) terlihat margin dan keuntungan terbesar terdapat pada saluran pemasaran I. Margin pemasaran pada saluran I sebesar Rp.1.741,7 per kg dan keuntungan sebesar Rp. 3.526 per kg.

Untuk mengetahui efisiensi pemasaran rumput laut dapat dilihat dari margin dan bagian yang diterima pembudidaya (*farmers share*) pada setiap saluran pemasaran yang ada. *Farmers share* merupakan bagian yang diterima pembudidaya dengan harga yang diterima konsumen. Saluran pemasaran dikatakan paling efisien apabila memiliki margin terkecil dan *farmers share* terbesar (Roziah, 2005 dalam Sobirin 2009). Jika dilihat dari margin dan *farmers share* pada Tabel 3, saluran II memiliki nilai margin terkecil (Rp. 1000) dan *farmers share* terbesar (86,67%). Hal ini berarti bahwa saluran pemasaran II adalah saluran pemasaran yang paling efisien diantara 3 saluran pemasaran dapat dilihat pada Tabel 3.



Gambar 3. Pola Saluran Pemasaran Rumput Laut 3

Tabel 3. Total Biaya, Keuntungan dan Margin Pemasaran Rumput Laut Setiap Saluran Pemasaran di Kabupaten Sumbawa, 2012

Uraian	Kering		Produk Olahan
	Saluran Pemasaran 1	Saluran Pemasaran 2	Saluran Pemasaran 3
Margin pemasaran (Rp/kg)	1.741,7	1.000,0	35.000,0
Margin Pemasaran/ (%)	19,9	13,3	70,0
Kontribusi sektor pembudidaya (%)	80,1	86,67	30,00

PENUTUP

Lembaga pemasaran yang terlibat dalam saluran pemasaran di kawasan sentra minapolitan adalah: pedagang pengumpul lokal 1, pedagang pengumpul lokal 2 pedagang pengumpul besar, dan pengolah. Masing-masing lembaga memiliki fungsi pemasaran yang dilakukan perorangan atau kelompok. Ada tiga fungsi pemasaran dalam pemasaran rumput laut di Kabupaten Sumbawa yaitu: fungsi pertukaran, fungsi fisik, dan fungsi fasilitas. Permasalahannya adalah masih terdapat praktek-praktek lembaga pemasaran yang dapat mengurangi kualitas produk rumput laut. Pola saluran pemasaran rumput laut di Kabupaten Sumbawa terdiri dari tiga (3) saluran. Sifat produk yang disalurkan pada rantai 1 dan 2 sama yakni dalam bentuk raw material, sedangkan sifat produk pada saluran 3 sudah dalam bentuk olahan.

Saluran yang paling efisien diantara ke tiga saluran pemasaran adalah saluran pemasaran 2. Hal ini terlihat nilai margin pemasaran yang terkecil dan *farmer's share* yang terbesar. Margin pemasaran berhubungan negatif dengan bagian yang diterima pembudidaya (*farmer share*). Semakin tinggi margin pemasaran, maka semakin kecil *farmer's share* yang diterima pembudidaya. Pada saluran 3 keuntungan yang diperoleh pembudidaya juga besar, namun kesenjangan harga di pembudidaya dengan pengolah sangat besar dengan biaya yang tidak terlalu jauh selisihnya. Sehingga saluran 3 dikategorikan kurang efisien. Meskipun demikian, industri pengolahan dapat menghasilkan pertambahan nilai yang jauh lebih besar dibandingkan dengan pemasaran ke dalam bentuk raw material. Dengan banyaknya variasi diversifikasi produk olahan rumput laut,

maka industri pengolahan rumput laut memiliki prospek untuk dikembangkan. Berdasarkan kondisi tersebut maka perlu dukungan kebijakan untuk menguatkan saluran pemasaran 2 dengan meningkatkan keberpihakan terhadap pembudidaya rumput laut.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (BBRSEKP) yang telah memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penelitian ini, rekan-rekan peneliti yang survey lapang dalam rangka pengumpulan data terkait dengan penelitian ini. Selain itu, ucapan terima kasih juga kepada segenap tim redaksi yang telah memberikan masukan dan arahan untuk penyempurnaan tulisan ini

DAFTAR PUSTAKA

- Asian Development Bank. 2006. Sustainable Aquaculture Development for Food Security and Poverty Reduction. Project Number 35183.
- Anggadiredja, J.T. 2008. Rumput Laut: Pembudidayaan, Pengolahan, dan Pemasaran Komoditas Perikanan Potensial. Penebar Swadaya, Jakarta.
- Dewi, U., 2006. Analisis Kelayakan Usahatani Dan Efisiensi Pemasaran Salak Pondoh (Kasus Di Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara, Propinsi Jawa Tengah. Tesis, Institut Pertanian Bogor.
- Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan. 2012. Konsep Pengembangan Industrialisasi Rumput Laut. Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jakarta.
- Harifuddin, Aisyah dan Budiman, 2011. Analisis Margin dan Efisiensi Pemasaran Rumput Laut di Desa Mandalle Kecamatan Mandalle, Kabupaten Pangkep. Jurnal AGRIBISNIS Vol. X (3). Hal 38-48.

- Hikmayani, Y., T. Apriliani, A. Zammroni, 2005. Analisis pemasaran rumput laut di Wilayah Potensial di Indonesia. Jurnal Kebijakan dan Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan perikanan. Badan Riset Kelautan dan Perikanan. Jakarta. Hal 159-175.
- Indriani, H dan Suminarsih E. 1999. Budidaya, Pengolahan, dan Pemasaran Rumput Laut. Tim Penulis PS. Cet. 6 – Jakarta. Penerbit Swadaya, Jakarta.
- Juanda, B. 2009. Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis. Edisi 2. ISBN 978-979-493-158-5. IPB Press, Bogor. 202 hal.
- Maholtra, N.K. 1996. Marketing Research: Analysis Applied Orientation. Second Edition, Prentice Hall International Inc., New Jersey.
- Purcell. W.D. 1979. Agricultural Marketing: System, Coordination, Cash and Future Price. Prentice Hall Company, Virginia.
- Roziah,S.,2005. Efficiency studies Pondoh Line Marketing (Salacca Adulis Reinw Pondoh cv) in sub district Turi Sleman. essay. UNSOED, Purwokerto. 102 p. (Unpublished)
- Singarimbun, M. dan Effendi, 1995, Metode Penelitian Survei, Edisi II, Penerbit PT. Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta.
- Sobirin, T. 2009. Efisiensi Pemasaran Pepaya (Carica papaya L.) di Kecamatan Subang Kabupaten Banyumas. Skripsi. Universitas Jenderal Soedirman. Purwokerto.
- Soekartawi, D.R. 2002. Prinsip Dasar Manajemen Pemasaran Hasil-hasil Pertanian. PT. Raja Grafindo. Jakarta.
- Tomek. W.G. and K.L. Robinson. 1990. Agricultural Product Price. 3rd ed. New York, USA: Cornell University.
- Triyanti, R., N. Shafitri. 2012. Kajian Pemasaran Ikan Lele (Clarias Sp) dalam mendukung industri-alisasi Perikanan Budidaya.

PENERAPAN MATERI MUATAN DALAM KESEPAKATAN INTERNASIONAL UNTUK KEBIJAKAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Implementation the Content of International Convention in National Policy for Marine and Fisheries Resources

***Bayu Vita Indah Yanti dan Hertria Maharani Putri**

Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
Gedung BRSDMKP I Lt. 4

Jalan Pasir Putih Nomor 1 Ancol Timur, Jakarta Utara

Telp: (021) 64711583 Fax: 64700924r 2015

*email: bviy1979@gmail.com

Diterima tanggal: 15 Juli 2017 Diterima setelah perbaikan: 9 November 2017

Disetujui terbit: 7 Desember 2017

ABSTRAK

Indonesia dikenal sebagai negara yang cukup aktif dalam komunitas internasional terkait dengan pemanfaatan sumber daya hayati. Makalah ini bertujuan untuk menganalisis penerapan materi muatan dalam kesepakatan internasional untuk kebijakan pemanfaatan sumber daya hayati. Hasil analisis dengan menggunakan *content analysis* terhadap materi muatan peraturan perundang-undangan, menunjukkan bahwa penerapan materi muatan dalam kesepakatan internasional tetap disesuaikan dengan kepentingan Indonesia. Artinya, penerapan secara keseluruhan materi kesepakatan tersebut dengan mempertimbangkan kepentingan politik Indonesia.

Kata Kunci: materi muatan; kesepakatan; sumber daya hayati; kelautan dan perikanan

ABSTRACT

Indonesia participates actively in international community concerning natural resources. This paper aims to analyze the implementation of international agreement contents toward Indonesian marine and fisheries resource policy. This study used content analysis toward regulation contents. The result shows that the implementation of international agreement substances is adjusted to Indonesia interests. It suggests that all agreements might consider the political interests of Indonesia.

Keywords: content material; agreements; biological resources; marine resources and fisheries

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang kaya akan potensi sumber daya alam. Kekayaan alam ini yang menjadi modal Indonesia untuk pembangunan. Pada saat ini, upaya perlindungan terhadap pemanfaatan sumber daya alam Indonesia masih dianggap belum optimal, mengingat adanya ancaman kepunahan sumber daya alam jika terdapat pemanfaatan secara berlebihan. Berdasarkan pemikiran tersebut, banyak negara mengadakan kesepakatan-kesepakatan agar nantinya timbul kesadaran pemanfaatan sumber daya alam harus memperhatikan keberlanjutan demi generasi mendatang. Pemanfaatan sumber daya alam

antar negara, pada umumnya diatur dengan konsep '*common heritage of mankind*'/warisan bersama umat manusia, yang dianggap sebagai prinsip utama pengaturannya (Mardianis, 2016).

Selain dikenal sebagai negara yang kaya akan potensi sumber daya alamnya, Indonesia juga dari sikap politik luar negeri Indonesia yang harus menghindarkan diri dari keterikatan atas perjanjian internasional dengan salah satu blok. Keterikatan terhadap negara-negara besar, dianggap mengganggu keseimbangan kehidupan politik dan akan pula menghambat pembangunan Indonesia sebagai suatu bangsa yang bebas; dan kebijakan ini berkembang pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang

Korespondensi Penulis:

Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
Gedung Balitbang KP I Lt. 4 Jalan Pasir Putih Nomor 1 Ancol Timur, Jakarta Utara, Indonesia
Telp: (021) 64711583 Fax: 64700924

Yudhoyono (SBY), dengan istilah dalam politik luar negeri Indonesia tidak lagi "mendukung diantara dua karang", karena kekuatan Uni Soviet telah lama runtuh. Konsep baru yang dilontarkan oleh Presiden SBY adalah *navigating a turbulent ocean* atau "mengarungi samudera yang bergolak". Ini berarti telah terjadi perubahan yang sangat drastis seperti mulai masuknya era globalisasi, industrialisasi, masuknya pasar bebas, aktor-aktor NGO, dan lain sebagainya (Noventari, 2016). Kebijakan politik luar negeri Indonesia ini menjadi salah satu pemberi pengaruh bagi Indonesia dalam bersikap dalam kesepakatan-kesepakatan internasional, tidak terkecuali dalam kesepakatan-kesepakatan Internasional terkait pemanfaatan sumber daya hayati.

Prinsip bebas aktif dalam kebijakan luar negeri suatu negara jika dilihat dari teori peran, bersumber pada dua hal yaitu konsepsi peran dan harapan peran. Prinsip bebas aktif ini merupakan salah satu sumber konsepsi peran bagi Indonesia sehingga prinsip ini patut dilihat seberapa besar pengaruhnya dan bagaimana digunakan oleh para pengambil kebijakan (Agus H., 2014). Kebijakan politik bebas aktif ini juga membuat Indonesia dikenal sebagai negara yang cukup aktif berinteraksi dengan komunitas internasional, termasuk yang terkait dengan kesepakatan-kesepakatan internasional terkait kebijakan pemanfaatan sumber daya hayati. Seiring dengan berkembangnya kebijakan pengelolaan sumber daya, dan juga kepentingan Indonesia dalam menerapkan materi muatan dalam kesepakatan internasional tersebut, bagaimana Indonesia menerapkan materi muatan dalam kesepakatan internasional pada kebijakan pemanfaatan sumber daya hayati, merupakan hal yang dibahas dalam tulisan ini dengan membatasi pada sumber daya kelautan dan perikanannya. Melihat praktek Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Indonesia mengakui supremasi hukum internasional, tetapi tidak menerima apa saja yang diamanatkan hukum internasional; terbukti dengan masalah nasionalisasi tahun 1958, dan

batas lebar laut territorial tahun 1930-1958-1960-1974, disebabkan karena kaidah-kaidah hukum internasional yang kurang jelas (kabur), dan tindakan sepihak negara dilakukan karena kepentingan nasional yang mendesak (Likadja dan Bessie, 1988). Jika melihat pada praktek yang telah dilakukan di Indonesia, Indonesia tetap tidak serta merta menerima supremasi hukum internasional ke dalam hukum nasional.

Oleh karena itu, riset ini bertujuan untuk menganalisis penerapan materi muatan dalam kesepakatan internasional untuk kebijakan pemanfaatan sumber daya hayati. Pembahasan permasalahan tersebut dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif, dengan melakukan *content analysis* terhadap materi muatan peraturan perundang-undangan.

Penerapan Hukum Internasional dalam Kebijakan Nasional Indonesia

Materi muatan hukum internasional, pada tahapan implementasi untuk kebijakan nasional Indonesia, lebih mengutamakan pada kepentingan Indonesia. Pada dasarnya Indonesia bersikap terkait kesepakatan dengan komunitas internasional juga berdasarkan pada kepentingan Indonesia. Kesepakatan-kesepakatan internasional yang dilakukan Indonesia akan membawa pengaruh pada kebijakan pemerintah Indonesia di dalam negeri baik secara langsung maupun tidak langsung, karena dalam hukum internasional berlaku asas *pacta sunt servanda*¹. Jika asas *pacta sunt servanda* ini diterapkan, maka negara harus menerapkan dan mengimplementasikan ketentuan perjanjian internasional itu dalam peraturan perundang-undangan nasionalnya. Pemerintah Indonesia berdasarkan hasil penelitian Tahar (2015) dalam membentuk peraturan perundang-undangan telah selaras/ senafas dengan konvensi atau perjanjian internasional yang telah disepakati.

Terkait dengan saat penerapan materi muatan dalam kesepakatan internasional tersebut dalam hukum nasional Indonesia, tetap

¹Pasal 26 Konvensi Wina 1969 "every treaty in force is binding upon the parties to it, and must be performed by them in good faith"

disesuaikan dengan kepentingan Indonesia. Indonesia telah melakukan kesepakatan, maka tidak berarti Indonesia akan menerapkan secara keseluruhan materi kesepakatan tersebut, mengingat terdapat penyesuaian dengan kepentingan politik Indonesia.

Kewajiban pokok dari suatu negara yang telah meratifikasi suatu perjanjian adalah menyesuaikan peraturan perundang-undangannya dengan perjanjian internasional tersebut. Pada hukum internasional dikenal beberapa doktrin implementasi hukum internasional ke dalam hukum nasional.

Pasal 2 ayat (1) huruf b Konvensi Wina 1969 menyebutkan bahwa *"ratification", "acceptance", "approval" and "accession" mean in each case the international act so named whereby a state establishes on the international plane its consent to be bound by a treaty"*. Artinya, ratifikasi merupakan suatu tindakan negara yang dipertegas oleh pemberian persetujuannya diikat dalam suatu perjanjian. Pasal 14 Konvensi Wina 1969 mempertegas, bahwa ratifikasi adalah salah satu cara untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian dan lazimnya didahului dengan adanya penandatanganan.

Hubungan hukum internasional dan hukum nasional juga dapat dibahas dengan doktrin transformasi dan doktrin inkorporasi, dimana pada konteks Indonesia, hukum nasional tidak menganut doktrin transformasi yang menyatakan bahwa untuk berlakunya hukum internasional dalam hukum nasional diperlukan upaya transformasi ke dalam hukum nasional melalui instrumen pengaturan dalam hukum nasional negara-negara, karena lebih condong pada sistem negara-negara kontinental eropa yakni langsung menganggap terikat dalam kewajiban untuk melaksanakan dan menaati semua ketentuan perjanjian dan konvensi internasional yang telah disahkan tanpa perlu mengadakan lagi perundang-perundangan pelaksanaan (*implementing legislation*) (Kusumaatmadja dan Agoes, 2003).

Konsekuensi penerapan kewajiban Internasional Indonesia sebagai Anggota Organisasi Internasional

Kebijakan pemerintah Republik Indonesia terkait keanggotaan Indonesia pada organisasi-organisasi internasional didasarkan pada Peraturan Presiden No.7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2004-2009, terutama dalam Bab 8 tentang Pemantapan Politik Luar Negeri dan Peningkatan Kerjasama Internasional. Melalui penetapan RJPM, pemerintah berusaha meningkatkan peranan Indonesia dalam hubungan internasional dan dalam menciptakan perdamaian dunia serta mendorong terciptanya tatanan dan kerjasama ekonomi regional dan internasional yang lebih baik dalam mendukung pembangunan nasional. Prioritas politik luar negeri Indonesia dituangkan dalam 3 (tiga) program utama yaitu program pemantapan politik luar negeri dan optimalisasi diplomasi Indonesia, program peningkatan kerjasama internasional yang bertujuan untuk memanfaatkan secara optimal berbagai potensi positif yang ada pada forum-forum kerjasama internasional dan program penegasan komitmen terhadap perdamaian dunia.

Lebih lanjut, berdasarkan Keputusan Presiden No. 64 tahun 1999, keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional diamanatkan untuk memperoleh manfaat yang maksimal bagi kepentingan nasional, didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku dan memperhatikan efisiensi penggunaan anggaran dan kemampuan keuangan negara. Keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional (OI) diharapkan dapat memberikan manfaat politik, ekonomi dan keuangan, sosial budaya, serta kemanusiaan. Manfaat keanggotaan Indonesia yang dimaksud antara lain:

1. Politik: dapat mendukung proses demokratisasi, memperkuat persatuan dan kesatuan, mendukung terciptanya kohesi sosial, meningkatkan pemahaman dan toleransi terhadap perbedaan, mendorong terwujudnya tata pemerintahan yang baik, mendorong penghormatan, perlindungan dan kemajuan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia;
2. Ekonomi dan keuangan: mendorong pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan

daya saing, meningkatkan kemampuan iptek, meningkatkan kapasitas nasional dalam upaya pencapaian pembangunan nasional, mendorong peningkatan produktivitas nasional, mendatangkan bantuan teknis, *grant* dan bantuan lain yang tidak mengikat;

3. Sosial Budaya: menciptakan saling pengertian antar bangsa, meningkatkan derajat kesehatan, pendidikan, mendorong pelestarian budaya lokal dan nasional, mendorong upaya perlindungan dan hak-hak pekerja migran; menciptakan stabilitas nasional, regional dan internasional;
4. Kemanusiaan: mengembangkan *early warning system* di wilayah rawan bencana, meningkatkan *capacity building* di bidang penanganan bencana, membantu proses rekonstruksi dan rehabilitasi daerah bencana; mewujudkan citra positif Indonesia di masyarakat internasional, dan mendorong pelestarian lingkungan hidup dan mendorong keterlibatan berbagai pihak dalam usaha-usaha pelestarian lingkungan hidup.

Penguatan penetapan keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional dikukuhkan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No.32 Tahun 2012. Untuk kebijakan teknis terkait pengusulan Indonesia untuk menjadi anggota dari suatu organisasi internasional dalam pelaksanaannya masih mengacu pada Keputusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor SK.1042/PO/VIII/99/28/01 tentang "Tata Cara Pengajuan Kembali Keanggotaan Indonesia serta Pembayaran Kontribusi Pemerintah Indonesia pada Organisasi-Organisasi Internasional". Menurut SK Menlu tersebut, dalam hal suatu instansi bermaksud mengusulkan keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional, usulan tersebut disampaikan secara tertulis kepada menteri Luar Negeri disertai dengan penjelasan mengenai dasar usulan serta hak dan kewajiban yang timbul dari keanggotaan itu. Pengusulan tersebut kemudian akan dibahas

oleh Kelompok Kerja Pengkaji Keanggotaan Indonesia dan Kontribusi Pemerintah Indonesia pada organisasi-organisasi Internasional dengan memperhatikan:

1. Manfaat yang dapat diperoleh dari keanggotaan pada organisasi internasional yang bersangkutan;
2. Kontribusi yang dibayar sebagaimana yang disepakati bersama dan diatur dalam ketentuan organisasi yang bersangkutan serta formula penghitungannya;
3. Keanggotaan Indonesia pada suatu organisasi internasional yang mempunyai lingkup dan kegiatan sejenis;
4. Kemampuan keuangan negara dan kemampuan keuangan lembaga non pemerintah.

Keanggotaan Indonesia dalam Organisasi Internasional

Beberapa keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional yang terkait dengan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dapat dilihat dalam Tabel 1 berikut ini. Pada tabel tersebut terlihat pada pelaksanaan peran sebagai perwakilan negara dalam organisasi internasional, ada keterkaitan antar kementerian dan/atau lembaga teknis yang kemudian berdasarkan tugas pokok dan fungsi (tusi) kementerian atau lembaga tersebut memiliki peran sebagai *pimpinan* kegiatan (*focal point*) pada saat mewakili Indonesia dalam organisasi internasional tersebut. Seperti keanggotaan Indonesia dalam CITES, meskipun pada pelaksanaannya, terdapat jenis-jenis satwa maupun tumbuhan yang masuk dalam kewenangan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, namun berdasarkan tusi kelembagaan awal pada saat menjadi anggota dalam CITES, maka *focal point* dalam CITES diwakili oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Jadi pada saat implementasi pelaksanaan kewajiban internasional Indonesia, diperlukan kerjasama *antar kementerian dan lembaga terkait* untuk penanganan kebijakan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.

Tabel1. Daftar Keanggotaan Indonesia Pada Organisasi Internasional yang Terkait Dengan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

No	Nama Organisasi Internasional	Keanggotaan		Focal Point	Keterangan
		Status Hukum	Dasar Hukum		
1.	Indian Ocean Marine Affairs Cooperation (IOMAC)	Anggota	KEPPRES No.86 Th.1993	Kementerian Luar Negeri	
2.	International Tribunal for The Law of The Sea (ITLOS)	Anggota	UU No.17 Th.1985	Kementerian Luar Negeri	ITLOS berdiri 1 Oktober 1996 Bermarkas di Hamburg, Jerman
3.	International Seabed Authority (ISA)	Anggota	UU No.17 Th.1985	Kementerian Luar Negeri	ISA berdiri tahun 1982 Bermarkas di Kingston, Jamaica
4.	Convention on International Trade in Endangered Species of wild fauna and flora (CITES)	Anggota 01-07-1975	KEPPRES No.43 Th.1978	Kementerian Kehutanan *saat ini menjadi Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK)	CITES dibentuk tahun 1963 untuk melindungi hewan dan tumbuhan yang terancam punah Berpusat di Jeneva, Swiss
5.	International Union for Conservation of Nature (IUCN)	Anggota		KLHK	IUCN didirikan tahun 1948 Pada tahun 1956 menjadi International Union for Conservation of Nature and Natural Resources Bermarkas di Gland, Swiss
6.	International Maritime Organization (IMO)	Anggota 07-05-1960		Kementerian Perhubungan	Konvensi IMO diadopsi tahun 1948 Bermarkas di London, Inggris
7.	Network of Aquaculture Centres in Asia-Pasific (NACA)	Anggota 2005	PERPRES No.72 Th.2005	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Bermarkas di Bangkok, Thailand
8.	Indian Ocean Tuna Commission (IOTC)	Anggota 09-09-2007	PERPRES No.9 Th.2007	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Bermarkas di Victoria, Seychelles
9.	Commission for Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT)	Anggota 08-04-2008	PERPRES No.109 Th.2007	Kementerian Kelautan dan Perikanan	CCSBT dibentuk bulan Mei 1993 guna melindungi Tuna Sirip Biru Bermarkas di Canberra, Australia
10.	Western and Central Pasific Fisheries Commission (WCPFC)	Cooperating non member (2004)		Kementerian Kelautan dan Perikanan	WCPFC didirikan tahun 2004
11.	Southeast Asian Fisheries Development Center (SEAFDEC)	Anggota		Kementerian Kelautan dan Perikanan	SEAFDEC dibentuk tahun 1967 Ditujukan untuk pengembangan perikanan yang berkesinambungan Sekretariat di Bangkok, Thailand
12.	Regional Trust Fund for The Implementation of the Action Plan for the Protection and Development of the Marine Environment and Coastal Areas of the East Asian Seas (COBSEA) FUND 810 INS	Anggota 1981		Kementerian Lingkungan Hidup *saat ini menjadi Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK)	COBSEA dibentuk tahun 1981 Ditujukan untuk melindungi ekosistem laut di kawasan

Lanjutan Tabel 1

No	Nama Organisasi Internasional	Keanggotaan		Focal Point	Keterangan
		Status Hukum	Dasar Hukum		
13.	Trust Fund for The Basel Convention on the Control of Trans-boundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal (BC) FUND 3060 INS	Anggota 20-09-1993	KEPPRES No.61 Th.1993	KLHK	Basel Convention (BC) diadopsi tahun 1989 guna mengatur perpindahan lintas perbatasan sampah berbahaya
14.	Trust Fund for Convention on Biological Diversity (CBD) FUND 5080 INS	Anggota 23-08-1994	UU No.5 Th.1994	KLHK	CBD diadopsi tahun 1992 Sekretariat berada di Montreal, Kanada
15.	Trust Fund for The Core Programme Budget for the Biosafety Protocol (BG) FUND 9340 INS (Cartagena Protocol)	Anggota 2000		KLHK	
16.	Kyoto Protocol	Anggota	UU No.17 Th.2004	KLHK	Kyoto Protocol diadopsi tahun 1997 di Kyoto, Jepang

Sumber: Kementerian Luar Negeri, 2016. Diunduh pada link: www.kemlu.go.id/id/kebijakan/Documents/Keanggotaan_Indonesia_pada_OI.pdf pada tanggal 1 Januari 2016.

Kesepakatan Internasional untuk Pemanfaatan Sumber Daya Hayati

Kebijakan pemanfaatan keanekaragaman hayati dalam suatu negara, secara tidak langsung memiliki keterkaitan dengan hubungan antar negara, mengingat pentingnya sumber daya hayati tersebut bagi ketahanan pangan, kesehatan masyarakat, konservasi keanekaragaman hayati, serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dunia. Sumber daya hayati merupakan aset bagi suatu negara, meskipun pada tatanan hubungan internasional terdapat kesepakatan ketentuan dalam pemanfaatan sumber daya hayati di suatu negara, dan hak berdaulat (*sovereignty right*) negara atas sumber daya hayati tersebut tetap ada dan diakui dalam kesepakatan

internasional pemanfaatan sumber daya hayati.

Untuk kondisi Indonesia, sektor kelautan dan perikanan saat ini menjadi satu-satunya sektor yang dapat mendorong ketahanan pangan (*food security*) dan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*). Hal ini semakin menekankan pentingnya kebijakan terkait pemanfaatan sumber daya hayati berkelanjutan sejalan dengan materi dalam FAO CCRF². Pelaksanaan kebijakan pemanfaatan sumber daya hayati kelautan dan perikanan pada pemerintahan saat ini harus selaras dengan visi kelautan dan perikanan dengan didasarkan pada prinsip kedaulatan (*sovereignty*), keberlanjutan (*sustainability*), dan kesejahteraan masyarakat (*prosperity*) pada saat ini³.

²Pasal 6.1 FAO *Code of Conduct for Responsible Fisheries* "states and users of living aquatic should conserve aquatic ecosystems. The right to fish carries with it the obligation to do so in a responsible manner so as to ensure effective conservation and management of living aquatic resources."

³Visi dan misi pembangunan kelautan dan perikanan dijabarkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.25/PERMEN-KP/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019. Penjabaran tujuan pembangunan kelautan dan perikanan terkait dengan kedaulatan (*sovereignty*), keberlanjutan (*sustainability*), dan kesejahteraan (*prosperity*). Untuk menjaga kedaulatan (*sovereignty*) dilakukan dengan 1) meningkatkan pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan, 2) mengembangkan sistem perkarantina ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan; untuk menjaga keberlanjutan (*sustainability*) dilakukan dengan 1) mengoptimalkan pengelolaan ruang laut, konservasi dan keanekaragaman hayati laut, 2) meningkatkan keberlanjutan usaha perikanan tangkap dan budidaya, 3) meningkatkan daya saing dan sistem logistik hasil kelautan dan perikanan; dan untuk mencapai kesejahteraan (*Prosperity*) dilakukan dengan 1) mengembangkan kapasitas SDM dan pemberdayaan masyarakat dan 2) mengembangkan inovasi iptek kelautan dan perikanan.

Kemudian, jika melihat pada asas kebebasan yang melekat pada rezim laut lepas, sebagaimana tercantum dalam Pasal 87 UNCLOS 1982 dimana prinsip *freedom of the high seas* yang meliputi kebebasan berlayar (*freedom of navigation*), kebebasan penerbangan (*freedom of over flight*), kebebasan untuk memasang kabel dan pipa di bawah laut (*freedom of lay submarine cables and pipelines*), kebebasan untuk membangun pulau buatan dan instalasi lainnya (*freedom of construct artificial islands and other installations permitted under international law*), kebebasan menangkap ikan (*freedom of fishing*), dan kebebasan riset ilmiah (*freedom of scientific research*) dengan tetap memperhatikan kepentingan negara lain yang dapat juga menjalankan hak yang sama dan ketentuan hukum internasional lain yang mengaturnya (Solihin, 2010). Implementasi prinsip ini juga menghadapi tantangan adanya ancaman *environmental degradation*.

Hal ini juga yang menjadi pertimbangan kebijakan pemanfaatan sumber daya hayati di wilayah perairan Indonesia, agar pelaksanaan ketentuan hukum internasional secara politik tidak mengganggu wilayah kedaulatan negara Indonesia.

PENUTUP

Penerapan materi muatan dalam kesepakatan internasional tersebut dalam ketentuan hukum nasional tetap menyesuaikan dengan kepentingan Indonesia. Keterikatan dalam kesepakatan internasional tidak menyebabkan Indonesia akan menerapkan secara keseluruhan materi kesepakatan tersebut tanpa adanya penyesuaian dengan kepentingan politik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Haryanto, Agus. 2014. Prinsip Bebas Aktif Dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia: Perspektif Teori Peran. Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Volume IV No.II/ Desember 2014.
- Kusumaatmadja, M. dan Etty R. Agoes. 2003. Pengantar Hukum Internasional. Bandung: Alumi.
- Likadja, F.E. dan D.F. Bessie. 1988. Desain Instruksional Dasar Hukum Internasional.

Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988. 153 hlm. ISBN 979-450-240-9.

- Mardianis. 2016. Status Hukum Sumber Daya Alam di Luar Yuridiksi Nasional dan Posisi Negara Maju di Bidang Keantariksaan. Jurnal Ilmu Hukum Padjadjaran. Vol.3 No.3 Tahun 2016. ISSN: 2460-1543.
- Marzuki, P.M. 2005. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2005. Edisi Revisi. 260 hlm. ISBN 978-602-7985-16-2.
- Nugroho, R. 2014. National Security: Policy Sebuah Pengantar. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014. Cet.1. 134 hlm. ISBN 978-602-229-305-7.
- Noventari, Widya. 2016. Peran Diplomasi Politik Luar Negeri dan Angkatan Perang Dalam Mewujudkan Stabilitas Nasional. Diunduh dilink: <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi79pm-b3rZeAhVB6Y8KHcrnDJwQFjAHegQ-IBRAC&url=http%3A%2F%2Fjournal.um.ac.id%2Findex.php%2Fjppk%2Farticle%2Fview%2F5522%2F2177&usg=AOvVaw1F7WTNu79lrzkLQiqe1f4d>.
- Soekanto, S. dan S. Mamudji. 2010. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Solihin, A. 2010. Politik Hukum Kelautan dan Perikanan: Isu, Permasalahan, dan Telaah Kritis Kebijakan. Bandung: Nuansa Aulia, 2010. Cet.1. 150 hlm. ISBN 978-979-071-069-6.
- Tahar, A.M. 2015. Pengaruh Hukum Internasional terhadap Pembentukan Hukum Nasional. Diterbitkan dalam Jurnal Ilmu Hukum Selat. Tanjung Pinang: Universitas Maritim Raja Ali Haji. Vol.2 No.2. Edisi ke-4. Mei 2015. Hlm.227-237. ISSN 2354-8649.
- Peraturan/ Undang-undang:**
- FAO. *Code of Conduct for Responsible Fisheries*.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2015. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. PerMen KP No.23/PERMEN-KP/2015.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2015. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019. PerMen KP No.25/PERMEN-KP/2015.
- Kementerian Luar Negeri RI (Kemlu). 2016. Daftar Keanggotaan Indonesia pada Organisasi

Internasional. Diunduh pada link: www.kemlu.go.id/id/kebijakan/Documents/Keanggotaan_Indonesia_pada_OI.pdf pada tanggal 1 Januari 2016.

Keputusan Menteri Luar Negeri RI No.SK 1042/PO/VIII/99/28/01 tentang Tata Cara Pengajuan Keanggotaan Indonesia serta Pembayaran Kontribusi Pemerintah Indonesia pada Organisasi-organisasi Internasional.

Keputusan Presiden RI No.32 Tahun 2012 tentang Pengukuhan Penetapan Keanggotaan Indonesia pada Organisasi Internasional.

Keputusan Presiden RI No.64 Tahun 1999 tentang Keanggotaan Indonesia dan Kontribusi Pemerintah Indonesia pada Organisasi-organisasi Internasional.

United Nations. United Nations on Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), 10 December 1982. Diunduh dari http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf

Wina 1969: Vienna Convention on the law of treaties (with annex). Concluded at Vienna on 23 May 1969. Diunduh dari <https://treaties.un.org/doc/publication/unts/volume%201155/volume-1155-i-18232-english.pdf>.

USAHA BUDI DAYA IKAN LELE (*Clarias sp*) PADA KAWASAN MINAPOLITAN “KAMPUNG LELE” KABUPATEN BOYOLALI

Catfish Aquaculture Bussiness at Minapolitan Area “Kampung Lele” in Boyolali District

***Maulana Firdaus, Hertria Maharani Putri dan Rani Hafsaridewi**

Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
Gedung BRSDMKP I Lt. 4
Jalan Pasir Putih Nomor 1 Ancol Timur, Jakarta Utara
Telp: (021) 64711583 Fax: 64700924
*email: mr_firda@hotmail.com

Diterima tanggal: 20 Maret 2017 Diterima setelah perbaikan: 9 November 2017

Disetujui terbit: 7 Desember 2017

ABSTRAK

Kabupaten Boyolali merupakan salah satu kawasan minapolitan yang ada di Jawa Tengah, yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor KEP.32/MEN/2010 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan. Berdasarkan keputusan tersebut, pengembangan usaha perikanan khususnya budidaya Ikan Lele (*Clarias Sp*) semakin gencar dilakukan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran pola pengelolaan, permasalahan yang dihadapi, pemasaran hasil produksi, serta memberikan gambaran terhadap struktur biaya, penerimaan, keuntungan dan nilai *R/C ratio*. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus, dengan pemilihan sampel menggunakan purposive sampling. Berdasarkan hasil analisis, usaha budidaya ikan lele di Desa Tegal Rejo secara keseluruhan masih layak diusahakan karena memiliki nilai *R/C ratio* > 1. Permasalahan usaha yang dihadapi oleh pembudidaya terkait dengan ketersediaan benih, kenaikan harga pakan, harga jual ikan lele dan serangan penyakit. Dalam menjaga keberlanjutan usaha budidaya Ikan Lele pada kawasan minapolitan “Kampung Lele” Desa Tegal Rejo, perlu memperhatikan daya dukung lingkungan serta pengelolaan usaha yang baik.

Kata Kunci: budidaya ikan lele; minapolitan; Boyolali

ABSTRACT

Boyolali is one of Minapolitan Area in Central Java Province as defined in the decree of Minister of Marine Affairs and Fisheries Number KEP.32/MEN/2010. Consequently, catfish (*Clarias SP*) aquaculture in this area are increasingly developed. This study aims to describe the management patterns, problems and marketing as well as to illustrate the cost structure, revenue, profits and the value of *R/C ratio*. This research applied case study method and purposive sampling method. Overall, aquaculture business of catfish in Tegalrejo is feasible due to its value of *R/C ratio* > 1. However, problems related to this aquaculture business are availability of seed, increased feed price, catfish price and disease attack. Therefore, the sustainability of catfish farming in “Kampung Lele” Tegalrejo Village should be strengthened with supporting environment and good business management.

Keywords: catfish aquaculture; minapolitan; Boyolali

PENDAHULUAN

Tingginya angka kemiskinan, pengangguran dan rendahnya produktivitas sektor riil masih menjadi permasalahan mendasar yang dihadapi dalam proses pembangunan di Indonesia. Menurut Samuelson dan Nordhaus

(2005), untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi maka diperlukan sebuah kebijakan oleh pemerintah sebagai salah satu cara mengurangi kemiskinan. Dalam rangka mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan produktivitas sektor perikanan khususnya di daerah pedesaan, pemerintah pusat melalui Kementerian

Korespondensi Penulis:

Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
Gedung Balitbang KP I Lt. 4 Jalan Pasir Putih Nomor 1 Ancol Timur, Jakarta Utara, Indonesia
Telp: (021) 64711583 Fax: 64700924

Kelautan dan Perikanan mempunyai program dengan konsep Minapolitan. Pengurangan tingkat pengangguran menjadi isu penting dalam pencapaian pemerataan kesejahteraan, karena tingkat pengangguran memiliki korelasi positif dengan tingkat kemiskinan (Hudaya, 2009). Pengembangan Minapolitan merupakan pembangunan agribisnis yang terintegrasi dengan pembangunan wilayah. Pendekatan pembangunan minapolitan merupakan pendekatan pembangunan yang membutuhkan waktu panjang dan melibatkan banyak pihak. Tujuan yang hendak dicapai dari pengembangan kawasan minapolitan adalah untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui percepatan pengembangan wilayah, salah satunya dengan cara mendorong perkembangan usaha sektor perikanan.

Secara teknis, sebuah kawasan dikatakan sebagai kawasan minapolitan antara lain adalah sumber pendapatan sebagian besar masyarakat diperoleh dari kegiatan perikanan dan semua kegiatan yang ada dalam kawasan didominasi oleh kegiatan perikanan termasuk kegiatan budi daya dan pengolahan hasil perikanan. Kabupaten Boyolali merupakan salah satu kawasan Minapolitan yang ada di Jawa Tengah, yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor KEP.32/MEN/2010 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan. Keputusan ini tentu akan berdampak langsung pada pengembangan usaha perikanan yang ada di kabupaten tersebut, khususnya budi daya Ikan Lele (*Clarias Sp*).

Pengembangan usaha budi daya Ikan Lele pada kawasan ini terus didorong untuk mencapai tujuan dari program pemerintah tersebut, sehingga hal ini sangat berpengaruh terhadap peningkatan jumlah pelaku usaha budi daya di kabupaten ini. Namun, peningkatan jumlah pelaku usaha budi daya Ikan Lele di Kabupaten Boyolali telah menimbulkan beberapa dampak, antara lain; pendapatan yang diterima oleh setiap pembudi daya semakin berkurang akibat semakin banyaknya kompetitor usaha dan input produksi semakin sulit dan harga jual komoditas budi daya (Ikan Lele) semakin rendah. Berdasarkan pendugaan awal tersebut diperlukannya pengkajian

terhadap kegiatan usaha budi daya Ikan Lele di Kabupaten Boyolali.

Data dan informasi yang dihasilkan melalui kegiatan riset bermanfaat bagi perencanaan pembangunan, termasuk pembangunan perikanan dan kelautan (Ryadi dan Bratakusumah, 2004). Hal ini dapat dilihat dengan adanya studi yang menghasilkan pola pendapatan rumah tangga, pola konsumsi dan keragaan usaha. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian yang mengkaji tentang keragaan usaha budi daya Ikan Lele (*Clarias Sp*) di Kawasan Minapolitan "Kampung Lele" bertujuan untuk memberikan informasi terhadap kegiatan usaha budi daya Ikan Lele, yang meliputi pola pengelolaan budi daya, permasalahan yang dihadapi, pemasaran hasil produksi, serta memberikan gambaran terhadap struktur biaya, penerimaan, keuntungan dan nilai *R/C ratio*. Oleh karena itu, sebagai langkah awal hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dari keragaan usaha budi daya Ikan Lele yang dilakukan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Boyolali.

Penelitian ini dilaksanakan di salah satu kawasan minapolitan yang ada di Jawa Tengah, tepatnya yaitu di Desa Tegalrejo (Kampung Lele), Kabupaten Boyolali pada Bulan Mei 2010. Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Data primer dikumpulkan melalui survey berbasis kuesioner. Analisis deskriptif dan analisis finansial digunakan untuk menganalisis pengelolaan budi daya Ikan Lele dan aspek finansialnya. Analisis finansial bertujuan untuk mengetahui perkiraan dalam hal pendanaan dan aliran kas, sehingga dapat diketahui layak atau tidaknya bisnis yang dijalankan (Supomo dan Indriantoro, 2002; Husein, 2001; Kadariah, 1978)

Karakteristik dan Pengelolaan Usaha Budi Daya Ikan Lele

Kabupaten Boyolali yang mempunyai luas wilayah sekitar 101.510,1955 hektar ini terdiri dari 19 Kecamatan yang terbagi menjadi 262 desa dan 5 kelurahan, dan 83% atau 224 desa/kelurahan berada di dataran rendah. Hanya 17%

atau 38 desa/kelurahan berada di dataran tinggi. Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Boyolali adalah (BPS, 2010) :

- Sebelah Utara : Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Semarang.
- Sebelah Timur : Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen dan Kabupaten Sukoharjo.
- Sebelah Selatan : Kabupaten Klaten dan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
- Sebelah Barat : Kabupaten Magelang dan Kabupaten Semarang

Secara geografis, posisi wilayah Kabupaten Boyolali terletak 110°22'-110°50' BT dan 7°36'-7°71' LS. Kondisi topografi Kabupaten Boyolali sangat bervariasi, hal ini disebabkan karena ketinggian wilayah Kabupaten Boyolali sekitar 75 sampai 1.500 meter dari permukaan laut. Berdasarkan topografinya Kabupaten Boyolali berada pada ketinggian antara 75-1500 meter diatas permukaan laut.

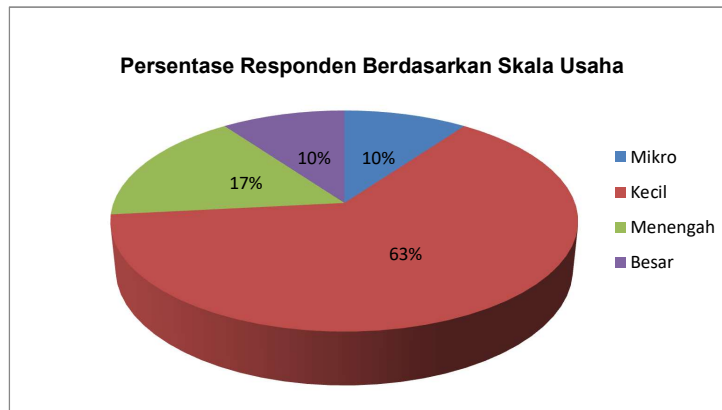
Luas areal budi daya Ikan Lele di Kabupaten Boyolali pada tahun 2008 adalah sebesar 33 hektar dan kawasan budidaya terluas terletak di Kecamatan Sawit dengan luas lebih dari 60 persen dari total kawasan budidaya di Kabupaten Boyolali (Zarnuzi, 2011). Wilayah

yang menjadi sentra budi daya Ikan Lele di Kabupaten Boyolali adalah Desa Tegalrejo. Secara administrasi, Desa Tegalrejo terdiri dari 10 wilayah dusun/kampung, yaitu: Jetak, Mutih, Jetis, Mojokulon, Mojoetan, Tegalrejo, Tegalsari, Oro-oro dan Ngregunung. Dusun yang mempunyai potensi perikanan hanya Dusun Mengkubumen, Tegalsari dan Mutih. Sedangkan ketujuh dusun lainnya merupakan kawasan dengan potensi pertanian. Sektor yang berkembang di masing-masing kampung dapat dilihat dari Tabel 1. Hampir seluruh lahan yang ada pada Dusun Mangkubumen beralih fungsi dari penggunaan lahan untuk pertanian menjadi perikanan. Usaha perikanan yang dilakukan oleh masyarakat di Dusun Mangkubumen adalah usaha pembesaran Ikan Lele. Selain usaha pembesaran Ikan Lele, usaha perikanan lainnya yang berkembang di Dusun Mangkubumen adalah usaha pengolahan, seperti abon Ikan Lele dan keripik Ikan Lele.

Responden yang dijadikan sampel pada penelitian ini adalah pembudi daya melakukan usaha pembesaran Ikan Lele di Desa Tegalrejo, yang berjumlah sebanyak 30 responden. Pembudi daya Ikan Lele di Desa Tegalrejo dibedakan berdasarkan skala usahanya, yaitu pembudi daya dengan skala usaha mikro (luas lahan < 500 M²), pembudidaya dengan skala usaha kecil (luas lahan 500 M² – 2.000 M²), pembudidaya

Tabel 1. Sektor yang berkembang di Desa Tegalrejo, Kabupaten Boyolali, 2010.

No	Kampung	Sektor yang Berkembang
1	Mojokulon	Pertanian (Padi, tembakau, jagung Tomat, Bawang, Cabe Merah)
	Jetis	Pertanian (Padi, tembakau, jagung Tomat, Bawang, Cabe Merah)
	Jetak	Pertanian, Sentra pengumpulan dan penjualan limbah pabrik
	Mutih	Pembenihan Lele (ada 4 orang) dan pembesaran Ikan Lele (ada 2 orang)
2	Mangkubumen (Kampung Lele)	Perikanan (pembesaran Lele di seluruh Kampung Mangkubumen)
	Mojoetan	- Pertanian (Padi, tembakau, jagung Tomat, Bawang, Cabe Merah) - Peternakan (penetasan telur itik)
	Ngregunung	Pertanian (Padi)
3	Tegalrejo	Pertanian (Padi, tembakau, jagung Tomat, Bawang, Cabe Merah)
	Tegalsari	- Pertanian (Padi) - Perikanan (pembenihan Lele, tapi hanya 1 orang)
	Oro-oro	Pertanian (Padi, tembakau, jagung Tomat, Bawang, Cabe Merah)



Gambar 1. Persentase Jumlah Responden Berdasarkan Skala Usaha Budi daya, Desa Tegalrejo, Kabupaten Boyolali, 2010.

dengan skala usaha menengah (luas lahan 2.000 M² – 5.000 M²) dan pembudidaya dengan skala usaha besar (luas lahan > 5.000 M²). Mayoritas pembudidaya yang ada di Desa Tegalrejo adalah pembudi daya dengan skala usaha kecil, sehingga persentase responden dengan skala usaha kecil lebih banyak dibandingkan lainnya. Jumlah responden dengan skala usaha mikro berjumlah 3 orang, responden dengan skala usaha kecil berjumlah 19, responden dengan skala usaha menengah berjumlah 5 orang dan responden dengan skala usaha besar berjumlah 3 orang.

Berdasarkan status kepemilikan lahan, sebanyak 20 orang atau 66,67% responden di Kampung Lele menggunakan lahan milik sendiri dan sewa. Sementara itu, responden yang hanya mengelola lahan milik sendiri sebanyak 5 orang atau 16,67%, begitu pula yang mengelola lahan sewa hanya berjumlah 5 orang atau 16,67% (Tabel 2).

Responden yang melakukan sewa lahan merupakan bentuk dari pengembangan usaha budi daya, dengan harapan semakin

banyak petakan yang diusahakan untuk budi daya Ikan Lele maka akan semakin banyak pula hasil yang dapat diperoleh. Berdasarkan atas pemanfaatan lahan budi daya, mayoritas responden memanfaatkan 75% sampai dengan 100% lahannya untuk budi daya Ikan Lele. Hal ini menunjukkan bahwa, usaha budi daya Ikan Lele sebagai salah satu mata pencaharian utama yang dapat diandalkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Untuk responden yang tergolong dalam skala usaha besar, pemanfaatan lahannya untuk usaha budi daya ikan rata-rata berkisar kurang dari 25% dari luas total lahan yang dimilikinya, hal ini disebabkan oleh sebagian besar lahannya disewakan kepada pembudidaya lain. Hal ini disebabkan karena lahan yang dimilikinya adalah warisan keluarga, pemilik lahan memiliki pekerjaan utama selain budi daya ikan dan pemilik lahan pernah mengalami kerugian dalam usaha budi daya, sehingga petakan yang sudah tidak berproduksi disewakan kepada orang lain. Sistem sewa yang diterapkan yaitu dalam jangka waktu per siklus panen atau per tahun.

Tabel 2. Jumlah Responden Berdasarkan Status Kepemilikan Lahan, Desa Tegalrejo, Kabupaten Boyolali, 2010.

Status Lahan	Responden	
	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
Milik Sendiri	5	16,67
Sewa	5	16,67
Milik Sendiri & sewa	20	66,67
Jumlah	30	100

Berdasarkan hasil wawancara, tingkat pendidikan responden cukup beragam. Hampir seluruh responden atau 70% sudah mencapai pendidikan dasar sembilan tahun. Apabila berasumsi bahwa yang tidak sekolah adalah tidak dapat membaca, maka sebesar 93,33% atau sebanyak 28 orang mampu membaca dan menulis (Tabel 3). Pemerintah daerah Kabupaten Boyolali dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan masyarakat tentang budi daya Ikan Lele melalui media cetak, *leaflet*, buku, brosur atau *booklet* yang dibagikan kepada pembudi daya.

Usaha budi daya Ikan Lele yang dilakukan masyarakat di Desa Tegalrejo telah berlangsung lama, sebelum dicanangkannya kawasan ini sebagai Kawasan Minapolitan. Tidak sedikit para pelaku usaha ini memiliki hubungan kekerabatan satu sama lainnya. Dengan dicanangkannya Desa Tegalrejo sebagai Kawasan Minapolitan dengan julukan “Kampung Lele” banyak lahan pertanian dan perkebunan yang beralih fungsi menjadi lahan budi daya. Selain itu, untuk mendukung usaha budi daya dilakukannya pembangunan saluran air disekitar kolam budi daya masyarakat, saluran ini ada yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat maupun bantuan dari pemerintah. Namun pembangunan saluran air ini belum menjangkau semua kolam budi daya yang ada di Desa Tegalrejo.

Teknik budi daya yang dilakukan oleh pembudi daya Ikan Lele banyak sekali ragamnya, namun dari semua teknik tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga teknik, yaitu teknik budi daya secara tradisional, semi intensif dan intensif. Seiring dengan berkembangnya jaman,

penggunaan teknik budi daya secara tradisional mulai berkurang, karena pada saat ini budi daya Ikan Lele merupakan salah satu usaha yang menjadikan karena kebutuhan Ikan Lele dipasaran semakin terus meningkat, sehingga pembudidaya mulai fokus dan meningkatkan produktivitas budi daya dengan menggunakan teknik secara intensif.

Pada umumnya pembudi daya Ikan Lele di Kabupaten Boyolali sudah melakukan praktek budi daya secara intensif. Usaha budi daya yang dilakukan adalah pembesaran Ikan Lele. Kolam yang digunakan adalah jenis kolam tanah dengan ukuran petakan 4m x 10m, namun ukuran petakan ini disesuaikan dengan luas lahan budi daya yang dimiliki oleh pembudi daya. Tanah yang baik untuk kolam pemeliharaan Ikan Lele adalah jenis tanah liat/lempung, tidak berporos, berlumpur dan subur. Lahan yang dapat digunakan untuk budi daya lele dapat berupa; sawah, kecomberan, kolam pekarangan, kolam kebun dan blumbang (Arifin, 1991). Usia panen Ikan Lele berkisar antara 3 s/d 4 bulan, tergantung permintaan pasar, dengan siklus usaha dalam satu tahunnya sebanyak 3 sampai dengan 4 kali per tahun. Input yang digunakan dalam usaha budi daya ini antara lain adalah benih Ikan Lele, pakan, pupuk, tenaga kerja dan lahan budi daya. Kualitas input yang digunakan sangat mempengaruhi terhadap besar kecilnya jumlah produksi yang dihasilkan.

Benih Ikan Lele yang digunakan sangat tergantung pada indukan/bibit lele. Apabila benih yang digunakan adalah jenis unggulan, maka akan meningkatkan hasil produksinya. Jenis benih yang unggulan saat ini adalah lele

Tabel 3. Jumlah Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan, Desa Tegalrejo, Kabupaten Boyolali, 2010.

Tingkat Pendidikan	Responden	
	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
Tdk sekolah	2	6,67
Tidak Lulus SD	0	0
Lulus SD	4	13,33
Lulus SLTP	3	10
Lulus SLTA	12	40
Lulus PT	9	30
Total	30	100

jenis sangkuriang dan *phyton*. Benih Ikan Lele yang digunakan dalam usaha pembesaran di Kabupaten Boyolali, sebagian besar diperoleh dari Jawa Timur, yaitu dari Kabupaten Tulung Agung. Namun tidak jarang para pembudidaya kesulitan dalam memperoleh benih Ikan Lele yang dibutuhkan sehingga mereka mendatangkan pula dari wilayah lain di Jawa Timur, seperti Kediri dan Blitar. Kualitas benih yang digunakan sangat berpengaruh terhadap tinggi rendahnya tingkat produksi yang dihasilkan. Berdasarkan hasil wawancara, jenis benih yang mereka peroleh tidak diketahui secara pasti jenisnya, apakah itu Ikan Lele jenis sangkuriang, *phyton* atau lainnya, pada saat ini benih yang digunakan sebagian besar sudah tidak murni dan tidak diketahui asal-usul indukannya. Jumlah benih yang ditebar yaitu berkisar antara 15.000 ekor sampai dengan 20.000 ekor tergantung dari luasnya kolam.

Pakan yang digunakan terdiri dari dua jenis pakan, yaitu pakan yang tenggelam dan pakan yang terapung, biasanya penggunaan pakan ini dengan persentase 60% untuk jenis pakan yang tenggelam dan sebanyak 40% untuk jenis pakan yang terapung. Pemberian pakan dilakukan sebanyak dua kali dalam sehari yaitu pada pagi hari dan sore hari, dimana jumlah pakan rata-rata yang dihabiskan dalam satu siklus yaitu sebesar 1.200 Kg. Penggunaan pupuk dalam usaha budi daya Ikan Lele ini adalah dimaksudkan untuk meningkatkan kesuburan dari perairan sebagai media budi daya ikan. Pada umumnya para pembudi daya menggunakan pupuk yang berasal dari kotoran hewan ternak, yaitu ayam. Rata-rata pupuk yang diberikan yaitu sebanyak 4,35 Kg/petak. Pupuk ini diberikan pada saat sebelum ditebarnya benih ke dalam kolam, hal ini dimaksudkan agar benih ikan yang ditebar dapat mendapatkan kelimpahan pakan alami akibat pemberian pupuk pada perairan sebagai media budi daya.

Permasalahan yang dihadapi Pembudidaya Ikan Lele

Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa permasalahan yang dihadapi dalam usaha budi daya Ikan Lele yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Tegalrejo. Permasalahan ini

terkait ketersediaan input produksi seperti benih, pakan, dan permasalahan yang terkait kestabilan harga jual. Permasalahan yang terkait dengan benih yaitu seringnya kurang ketersediaan benih pada saat para pembudi daya akan melakukan penebaran, karena untuk wilayah sekitar Kabupaten Boyolali belum adanya usaha pembenihan yang dilakukan untuk mendukung usaha pembesaran Ikan Lele di Desa Tegalrejo, selama ini pembudi daya di Desa Tegalrejo memperoleh benih dari wilayah Jawa Timur, yaitu dari Kabupaten Tulung Agung, Kediri dan Blitar. Selain ketersediaan benih yang selalu tidak tersedia, jauhnya jarak antara asal benih dengan lokasi budi daya menjadi salah satu penyebab menurunnya kualitas dari benih tersebut, lamanya perjalanan yang ditempuh membuat kondisi benih menjadi lemah karena terkena guncangan selama perjalanan dan oksigen yang terbatas dalam wadah (kantong). Pembudidaya Ikan Lele di Desa Tegalrejo berharap adanya sertifikasi untuk menjamin kualitas benih yang unggul. Semakin bagus kualitas benih yang digunakan maka berpengaruh positif terhadap peningkatan produksi. Selama ini, jenis benih Ikan Lele yang mereka gunakan tidak diketahui asal usul jenis indukannya, karena tidak adanya sertifikat dari benih tersebut.

Permasalahan yang terkait dengan pakan adalah menyangkut harga pakan yang semakin mahal. Kenaikan harga pakan ini berdampak pada besarnya keuntungan yang mereka peroleh. Hampir seluruh pembudi daya Ikan Lele di Desa Tegalrejo mengeluhkan masalah kenaikan harga pakan, karena kenaikan harga pakan tidak diimbangi dengan kenaikan harga jual Ikan Lele. Tidak sedikit pembudidaya Ikan Lele di Desa Tegalrejo yang gulung tikar akibat tidak mampu membeli pakan. Bagi pembudi daya yang masih bertahan, biasanya mereka memperoleh pakan dari pabrik, dan dibayar setelah panen. Pembelian pakan ini harus dalam jumlah yang banyak, sehingga pada umumnya pembudi daya dalam skala menengah keatas saja yang dapat memperoleh pakan dengan sistem ini.

Permasalahan yang terkait dengan harga jual adalah menyangkut harga jual Ikan Lele yang tidak stabil dan cenderung semakin rendah. Ada

banyak faktor yang menyebabkan harga jual Ikan Lele dikalangan pembudi daya di Desa Tegalrejo menjadi rendah, antara lain adalah semakin banyaknya kompetitor usaha yang ada selain dari dalam desa itu sendiri juga dari wilayah lainnya seperti Bogor, Tegal, Pekalongan dan beberapa wilayah lainnya di Jawa Timur sehingga ketika terjadi over produksi harga Ikan Lele menjadi murah. Permasalahan yang terkait kompetitor usaha yang berasal dari dalam desa, khususnya yaitu para pembudi daya yang menjual Ikan Lele dengan harga lebih murah dari pada harga pasar. Berdasarkan hasil wawancara banyak pembudi daya di Desa Tegalrejo yang mengeluhkan keberadaan pembudi daya tipe ini, biasanya pembudi daya tipe ini merupakan pembudi daya tradisional yang bersifat semi komersil, karena pada awalnya tujuan melakukan budi daya adalah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, namun jika hasilnya lebih maka akan dijual walaupun dengan harga murah. Permasalahan lain terkait dengan belum adanya sarana pembuangan limbah, kondisi saluran pengairan yang kurang permanen dan tidak berfungsi dengan baik sehingga menghambat proses pengairan ikan yang ada, belum ada sarana promosi hasil olahan dari produksi budi daya ikan, ada penyakit yang menyebabkan ikan mati, diduga karena virus atau bakteri (nama lokal, penyakit kuning).

Pemasaran dan Keberlanjutan Bisnis Ikan Lele

Pembudidaya Ikan Lele di Desa Tegalrejo menjual hasil panennya ke pedagang pengumpul yang datang langsung ke kolam pembudidaya dan kemudian dipasarkan di wilayah Yogyakarta, Solo dan wilayah lainnya sekitar Boyolali. Hasil penen ditimbang di dalam keranjang yang disaksikan oleh pembudidaya dan pedagang pengumpul kemudian dinaikkan ke dalam kendaraan. Penetapan harga dilakukan oleh pedagang pengumpul. Harga yang ditetapkan berdasarkan harga pasar atau berdasarkan tinggi rendahnya permintaan akan Ikan Lele. Harga Ikan Lele yang dijual ditingkat pembudidaya pada saat dilakukannya penelitian adalah berkisar antara Rp. 9.300 – Rp. 9.500 per Kg, harga ini tentu saja tergantung dari besar kecilnya Ikan Lele yang dijual. Pengangkutan hasil panen dengan

menggunakan mobil pick-up atau truk yang dimiliki oleh pedagang pengumpul. Berdasarkan hasil penelitian bahwa di Desa Tegalrejo terdapat tiga saluran pemasaran, yaitu;

- Saluran 1 : Pembudidaya – Pedagang Pengumpul – Pedagang Pengecer – Konsumen Lembaga – Konsumen Akhir
- Saluran 2 : Pembudidaya – Pedagang Pengumpul – Pedagang Pengecer – Konsumen Akhir
- Saluran 3 : Pembudidaya – Pedagang Pengumpul – Konsumen Lembaga – Konsumen Akhir

Dari ketiga saluran ini terlihat bahwa pada umumnya pembudidaya di Desa Tegalrejo selalu menjual hasil panennya kepada pedagang pengumpul. Panjang pendeknya saluran pemasaran menurut Ibrahim (2003) antara lain tergantung dari cepat atau tidaknya komoditas tersebut rusak, skala produksi dan posisi keuangan pelaku usaha. Menurut Triyanti dan Shafitri (2012), efisiensi saluran pemasaran dapat memberikan pengaruh terhadap nilai tambah dan pendapatan pembudidaya. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa panjang pendeknya saluran pemasaran disebabkan beberapa alasan, antara lain adalah sudah adanya kepercayaan antara pedagang pengumpul dengan pembudidaya, pembelian yang dilakukan oleh pedagang pengumpul dalam jumlah yang banyak. Selain itu, ada beberapa pedagang pengumpul yang memberikan modal pinjaman kepada pembudidaya, sehingga pembudi daya akan menjual hasil panennya kepada pedagang pengumpul bersangkutan dengan tujuan untuk mengembalikan pinjaman tersebut. Pedagang pengecer yang dimaksud adalah pedagang yang menjual Ikan Lele di pasar umum atau pasar ikan. Konsumen lembaga yang dimaksud adalah konsumen yang membeli Ikan Lele yang kemudian untuk dijual lagi, seperti restoran, warung makan atau pedagang pecel lele.

Dalam menjalankan kegiatan usaha budi daya, para pembudidaya akan menginvestasikan sebagian modal yang dimilikinya pada pembelian alat-alat atau aset produksi. Pada penelitian ini, biaya investasi yang diperhitungkan adalah

lahan, dan peralatan yang digunakan pembudi daya selama kegiatan usaha berlangsung, antara lain selang air, keranjang ikan, serokan, genset, kendaraan, serokan, timbangan dan lainnya. Biaya investasi terbesar yang dikeluarkan adalah untuk lahan. Namun tidak semua pembudi daya baik dari skala mikro sampai dengan skala besar, lahan budi dayanya adalah milik sendiri, namun ada sebagian yang menyewa.

Analisis usaha yang dilakukan pada usaha budi daya Ikan Lele dilakukan dalam kurun waktu satu siklus budi daya atau rata-rata selama 3 bulan, yang terdiri dari total penerimaan dan total biaya. Analisis usaha ini dibagi menjadi 4 macam, yaitu analisis usaha terhadap pembudidaya skala usaha mikro, kecil, menengah dan besar. Total penerimaan diperoleh dari hasil perkalian antara jumlah produksi dalam satu siklus usaha (3 bulan) dengan harga satuan (nilai) produksi. Harga rata-rata adalah harga pada saat dilakukannya penelitian, yaitu Rp. 9.400,-/kg dengan ukuran ikan dalam satu kg adalah 7-12 ekor. Komponen biaya yang dihitung dibedakan menjadi tiga yaitu biaya investasi, biaya variabel dan biaya tetap. Pada usaha budi daya Ikan Lele yang dilakukan oleh para pembudi daya di Desa Tegalrejo, biaya investasi terdiri dari biaya untuk pembelian lahan, pembuatan gudang pakan, pembelian keranjang (wadah ikan), genset, selang air, timbangan, serokan dan lainnya. Biaya tetap terdiri dari biaya sewa lahan dan penyusutan barang-barang investasi. Biaya-biaya tersebut diperoleh dari harga rata-rata dari seluruh jumlah responden baik dari pelaku usaha budidaya skala mikro, kecil, menengah maupun besar.

Total biaya yang dikeluarkan oleh pembudi daya Ikan Lele skala usaha mikro dalam kurun satu siklus usaha (3 bulan) adalah Rp.56.077.811,- dengan jumlah biaya tetap sebesar Rp. 1.738.611 dan biaya variabel Rp.54.339.200,- keuntungan yang diperoleh adalah Rp.14.398.889,-. Rasio antara penerimaan dengan biaya (R/C) adalah 1,26 dan lamanya waktu untuk pengembalian investasi adalah 0,37 atau selama 1,1 bulan. Total biaya yang dikeluarkan oleh pembudi daya Ikan Lele skala usaha kecil dalam kurun satu siklus usaha

(3 bulan) adalah Rp.196.714.500,- dengan jumlah biaya tetap sebesar Rp. 8.388.700,- dan biaya variabel Rp. 188.325.000,- keuntungan yang diperoleh adalah Rp. 20.346.100,- . Rasio antara penerimaan dengan biaya (R/C) adalah 1,1 dan lamanya waktu untuk pengembalian investasi adalah 2,48 atau selama 7,44 bulan. Total biaya yang dikeluarkan oleh pembudi daya Ikan Lele skala usaha menengah dalam kurun satu siklus usaha (3 bulan) adalah Rp. 516.162.750,- dengan jumlah biaya tetap sebesar Rp.10.354.500 dan biaya variabel Rp.505.808.250,- keuntungan yang diperoleh adalah Rp.69.035.750,- . Rasio antara penerimaan dengan biaya (R/C) adalah 1,13 dan lamanya waktu untuk pengembalian investasi adalah 4 atau selama 12 bulan. Total biaya yang dikeluarkan oleh pembudi daya Ikan Lele skala usaha besar dalam kurun satu siklus usaha (3 bulan) adalah Rp.549.856.700,- dengan jumlah biaya tetap sebesar Rp.4.360.000,- dan biaya variabel Rp.545.496.000,- keuntungan yang diperoleh adalah Rp.81.943.300. Rasio antara penerimaan dengan biaya (R/C) adalah 1,15 dan lamanya waktu untuk pengembalian investasi adalah 6,17 atau selama 18,1 bulan. Secara keseluruhan, usaha budi daya Ikan Lele di Desa Tegalrejo masih layak diusahakan karena memiliki nilai *R/C ratio* > 1. Menurut Kadariah (2001), jika nilai *R/C ratio* > 1 maka suatu usaha dapat dilanjutkan (Tabel 4).

Rata-rata nilai investasi terbesar, yaitu pada usaha budi daya yang dilakukan oleh pembudi daya skala besar, dimana nilai terbesar pada investasi lahan, pada umumnya kolam yang dimilikinya berkisar antara 30 sampai dengan 150 kolam, namun tidak semua kolam terisi. Banyak kolam yang tidak aktif digunakan untuk usaha budi daya karena beberapa alasan, antara lain kondisi tanahnya yang sudah tidak subur, letaknya jauh dari sumber air (pada saat kemarau) dan keterbatasan modal usaha. Selain memiliki lahan atau kolam milik sendiri, ada juga beberapa pembudi daya skala usaha besar menyewa kolam atau lahan dari pembudi daya lainnya. Biaya sewa lahan berkisar antara Rp.250.000,- s/d Rp 700.000,- per tahun. Sistem sewa dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu sewa lahan murni dan sewa lahan

bagi hasil. Sewa lahan murni yaitu, pembudi daya menyewa lahan (kolam) dan digarap sendiri atau pekerjanya sendiri, sedangkan sewa lahan bagi hasil yaitu, lahan yang disewa digarap oleh pemilik (yang menyewakan) lahan tersebut, namun semua biaya operasional ditanggung oleh penyewa lahan. Menurut Iko (2008), hak sewa tanah (pertanian) ada yang bersifat sementara namun harus diusahakan sendiri oleh penyewa dan tanpa adanya pemerasan. Praktek sewa lahan yang dilakukan oleh pembudi daya sudah sejalan dan dilakukan atas kesepakatan bersama tanpa ada yang dirugikan.

Pada usaha budi daya dengan skala usaha mikro pada umumnya memiliki kolam berkisar antara 4 sampai dengan 10 kolam. Pada pelaku usaha skala ini juga banyak yang menyewa lahan pada pembudidaya lainnya, namun biasanya kolam yang disewa digarap sendiri. Biaya variabel terbesar untuk semua jenis skala usaha, baik mikro, kecil, menengah dan besar yaitu pada biaya yang dikeluarkan untuk membeli pakan. Rata-rata jumlah pakan yang dikeluarkan untuk satu kolam per siklus budi daya yaitu berkisar antara 1.000 Kg sampai dengan 20.000 Kg, tentu saja ini tergantung dari luas kolam dan padat tebar Ikan Lele. Oleh

karena itu, usaha budi daya pada skala usaha besar memiliki nilai pada biaya pakan terbesar, karena jumlah kolam yang diusahakannya lebih banyak dibandingkan lainnya. Jika dilihat dari segi keuntungan, berdasarkan hasil penelitian usaha budi daya pada skala usaha mikro lebih menguntungkan dibandingkan lainnya, dengan nilai *R/C* sebesar 1,26, sedangkan nilai keuntungan yang paling rendah yaitu pada usaha budi daya skala usaha menengah, dengan nilai *R/C* 1,05. Hasil penelitian Rosalina untuk budidaya ikan lele di kolam terpal memberikan nilai *R/C* yang lebih tinggi yaitu sebesar 1,78. Penggunaan kolam terpal untuk budidaya lele di Kabupaten Boyolali dapat menjadi salah satu alternatif cara untuk meningkatkan keuntungan usaha.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan besar atau kecilnya keuntungan yang diperoleh, antara lain adalah besarnya biaya operasional (pakan) yang tidak diimbangi dengan harga jual Ikan Lele. Sebagai contoh, harga Ikan Lele turun pada saat panen menyebabkan nilai hasil penjualan lebih kecil dari biaya operasional yang dikeluarkan. Selain itu, terserangnya virus atau penyakit yang menyebabkan Ikan Lele mengalami kematian dan dipanen sebelum

Tabel 4. Analisa Usaha Budi Daya Ikan Lele, Desa Tegalrejo, Kabupaten Boyolali, 2010.

No	Uraian	Skala Usaha Mikro	Skala Usaha Kecil	Skala Usaha Menengah	Skala Usaha Besar
1	Investasi	5.356.667	50.425.789	276.157.000	505.610.000
2	Biaya Tetap				
	a. Sewa Lahan (Rp)	1.700.000	1.480.000	5.184.000	3.900.000
	b. Penyusutan (Rp)	38.611	6.908.700	5.170.500	460.000
	Total (Rp)	1.738.611	8.388.700	10.354.500	4.360.000
3	Biaya Variabel				
	a. Benih (Rp)	10.125.000	30.995.400	85.742.500	101.000.000
	b. Pakan (Rp)	43.300.000	154.210.600	409.000.000	.080.000
	c. Pupuk (Rp)	14.200	259.000	537.750	100.000
	d. Tenaga Kerja (Rp)	900.000	2.860.800	10.528.000	11.316.700
	Total (Rp)	54.339.200	188.325.800	505.808.250	545.496.700
4	Biaya Total (Rp)	56.077.811	196.714.500	516.162.750	549.856.700
5	Penerimaan (Rp)	70.476.700	217.060.600	585.198.500	631.800.000
6	Keuntungan (Rp)	14.398.889	20.346.100	69.035.750	81.943.300
7	R/C	1,26	1,10	1,13	1,15
8	PP	0,37	2,48	4,00	6,17

Keterangan : Siklus usaha = 3 bulan

waktunya. Sejalan dengan yang disampaikan oleh Gittinger (1986) bahwa dalam suatu bisnis bidang pertanian termasuk budidaya perikanan perubahan harga jual produk, perubahan volume produksi dan kenaikan biaya usaha sangat berpengaruh terhadap usaha yang dijalani. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sudana *et al* (2013) pada usaha budidaya ikan lele di Kabupaten Tabanan (Bali) menunjukkan bahwa perubahan harga output lebih peka terhadap keuntungan usaha dibandingkan perubahan harga input. Beberapa permasalahan ini dialami oleh hampir semua pelaku usaha budi daya Ikan Lele di Desa Tegalrejo. Berdasarkan hasil penelitian ini, diketahui bahwa besar kecilnya skala usaha tidak selalu menentukan besarnya keuntungan yang diterima, namun semakin besar skala usaha budi daya yang dilakukan, maka semakin besar pula biaya operasional yang dikeluarkan.

PENUTUP

Sebagian besar pembudidaya Ikan Lele di Desa Tegalrejo melakukan praktek budi daya secara intensif, usia panen berkisar antara 3 s/d 4 bulan. Media pemeliharaan yang digunakan adalah kolam tanah dengan padat tebar rata-rata mencapai 15.000 s/d 20.000 ekor per kolam. Pakan yang digunakan adalah pakan dari pabrik. Pupuk yang digunakan adalah pupuk yang berasal dari kotoran ayam, yang berguna untuk meningkatkan kesuburan air dalam kolam. Permasalahan utama yang dihadapi oleh pembudidaya Ikan Lele di Desa Tegalrejo adalah ketersediaan benih lele, semakin meningkatnya harga pakan yang tidak diimbangi dengan kenaikan harga jual Ikan Lele, kecenderungan harga Ikan Lele yang semakin rendah dan serangan penyakit yang mengakibatkan Ikan Lele dipanen sebelum waktunya (gagal panen). Pada umumnya pembudi daya Ikan Lele di Desa Tegalrejo menjual Ikan Lele kepada pedagang pengumpul yang berasal dari daerah Yogyakarta dan Solo. Hal ini dilakukan karena sudah adanya kepercayaan yang terjalin antara pembudi daya dengan pedagang pengumpul dan pembelian

ikan hasil produksi yang dilakukan oleh pedagang pengumpul bersifat *continue*.

Usaha budi daya Ikan Lele di Desa Tegalrejo masih layak untuk diusahakan, karena memiliki nilai R/C ratio > 1. Besarnya keuntungan per siklus usaha (selama 3 bulan) yang diperoleh untuk masing-masing skala usaha adalah Rp.14.398.889,- untuk skala usaha mikro, Rp.20.346.100,- untuk skala usaha kecil, Rp.69.035.750,- untuk skala usaha menengah dan Rp.81.943.300,- untuk skala usaha besar. Namun jika dilihat dari besarnya perbandingan antara penerimaan dengan biaya (R/C ratio), maka usaha budi daya Ikan Lele pada skala usaha mikro yang memperoleh keuntungan paling besar.

Perlunya pengkajian lebih lanjut mengenai analisa usaha pada budi daya Ikan Lele di Desa Tegalrejo, baik yang dilakukan pada skala usaha mikro, kecil, menengah maupun besar. Pengkajian terutama difokuskan pada aspek sosial ekonomi serta teknis budi daya, sehingga dapat diketahuinya secara pasti faktor-faktor yang menyebabkan usaha budi daya Ikan Lele pada skala usaha mikro lebih menguntungkan dari pada usaha budi daya Ikan Lele skala usaha besar ataupun sebaliknya. Pengembangan usaha budi daya harus disesuaikan dengan kondisi potensi wilayah tersebut dalam pengembangannya, sehingga keberlanjutan usaha budi daya yang dilakukan tetap terjaga. Pada usaha budi daya Ikan Lele di Desa Tegalrejo, daya dukung lingkungan perlu diperhatikan, seperti ketersediaan pasokan air serta kesuburan lahan budi daya, sehingga dapat menjadi faktor pertimbangan utama dalam pengembangan usaha budi daya lele. Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh para pembudidaya diperlukannya peranan pemerintah yang membantu dalam ketersediaan benih melalui pembentukan usaha pembenihan rakyat (UPR) di sekitar kawasan minapolitan. Introduksi pakan buatan sangat perlu dilakukan, karena selama ini biaya operasional terbesar adalah untuk pembelian pakan, dengan adanya introduksi pakan buatan diharapkan dapat menekan biaya operasional.

Terkait dengan harga jual ikan, pemerintah perlu mengatur standar harga Ikan Lele yang disesuaikan dengan kenaikan harga-harga input produksi, hal ini dilakukan untuk meminimalisir monopoli harga dari para pedagang pengumpul, yang terkadang merugikan para pembudi daya. Hal ini dapat diterapkan dengan cara kolaborasi antara para pembudi daya dengan para pedagang pengumpul, melalui kesepakatan bersama terhadap standar harga jual terendah Ikan Lele kepada budi daya, sehingga apabila ada pembudi daya yang melanggar dapat diberikan sanksi oleh pembudi daya lainnya serta apabila ada pedagang pengecer yang membeli Ikan Lele dibawah harga standar, maka akan diberikan sanksi pula, seperti tidak diperkenankan membeli ikan dikawasan “Kampung Lele” Desa Tegalrejo.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Balai Besar Riset Sosial Ekonomi yang telah memberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan penelitian evaluasi sosial ekonomi praktek budidaya ikan yang baik pada tahun 2010. Selain itu, ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh anggota tim penelitian yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama mengikuti penelitian ini dan juga kami ucapkan terima kasih kepada segenap tim redaksi yang telah memberikan masukan dan arahan untuk penyempurnaan tulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2010. Lele Indonesia. Budi daya Lele Secara Intensif. <http://leleindonesia.com> (diakses 17 September 2010).
- Arifin, M.Z. 1991. Budi daya Lele. Dohara Prize. Semarang.
- Badan Pusat Statistik. 2008. Kabupaten Boyolali Dalam Angka 2007.
- Badan Pusat Statistik. 2010. Kabupaten Boyolali Dalam Angka 2010.
- Gittinger J.P.1986. Analisa Ekonomi Proyeek-Proyek Pertanian. Penerjemah Slamet Sutomo dan Komet Mangiri. The Johns Hopkins University Press. Penerbit UI Press. Jakarta
- Hudaya, D. 2009. Faktor –Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Indonesia. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Institut Teknologi Bandung. Bandung.
- Husein, U. 2001. Study Kelayakan Bisnis Edisi 3 Revisi. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Ibrahim, J. 2003. Studi Kelayakan Bisnis. Edisi Revisi Cetakan ke-2. PT. Rnika Cipta. Jakarta
- Iko, H. 2008. Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes. Thesis. Fakultas Hukum. Universitas Diponegoro. Program Pasca Sarjana. Semarang.
- Kadariah. 1978. Pengantar Evaluasi Proyek. Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.
- Kadariah. 2001. Evaluasi Proyek Analisa Ekonomi. Edisi 2001. LPFE UI. Jakarta
- Riyadi dan Bratakusumah, D.S. 2004. Perencanaan Pembangunan Daerah. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Samuelson, P.A.W dan Nordhauss, D.W. 2005. Makroekonomi. Erlangga. Jakarta
- Sudana, S.N., Arga I.W dan Suparta, N. 2013. Kelayakan Usaha Budidaya Ikan Lele Dumbo (*Clarias gariepinus*) dan Pengaruhnya Terhadap Peningkatan Pendapatan Petani Ikan Lele di Kabupaten Tabanan. Jurnal Managemen Agribisnis Univ. Udayana. Vol 1 No 1 Mei 2013.
- Supomo, B dan Indriantoro, N. 2002. Metodologi Penelitian Bisnis, Cetakan Kedua. Penerbit BFEE UGM. Yogyakarta
- Triyanti, R dan Shafitri, N. 2012. Kajian Pemasaran Ikan Lle (*Clarias Sp*) Dalam Mendukung Industri Perikanan Budidaya (Studi Kasus di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah). Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. Vol 7 No 2 Tahun 2012 (177-191).
- Zarnuzi, A.T.A. 2011. Analisis Efisiensi Budidaya Ikan Lele di Kabupaten Boyolali (Studi Kasus di Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali). Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Diponegoro. Semarang.

POTENSI USAHA BUDI DAYA RUMPUT LAUT DI PULAU PANJANG KABUPATEN SERANG, PROVINSI BANTEN

Potential of Seaweed Farming Business in Pulau Panjang Serang District, Banten Province

Permana Ari Soejarwo

Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
Gedung Balitbang KP I Lt. 4
Jalan Pasir Putih Nomor 1 Ancol Timur, Jakarta Utara
Telp: (021) 64711583 Fax: 64700924
*email: ari_permana008@yahoo.com

Diterima tanggal: 12 Agustus 2017 Diterima setelah perbaikan: 9 November 2017

Disetujui terbit: 7 Desember 2017

ABSTRAK

Pulau Panjang merupakan salah satu wilayah pesisir di Kabupaten Serang, Provinsi Banten yang potensial untuk budidaya rumput laut. Usaha ini diprediksi mampu meningkatkan pendapatan masyarakat di Pulau panjang. Penelitian ini bertujuan mempelajari potensi usaha rumput laut di Pulau Panjang Kabupaten Serang. Data dan informasi primer dikumpulkan melalui observasi lapangan, *focus group discussion* (FGD) dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Serang, pembudidaya, perangkat desa, serta pengumpulan data sekunder. Data dianalisis secara deskriptif sehingga memberi informasi tentang potensi produksi rumput laut, rata-rata pendapatan pembudidaya dengan serapan tenaga serta nilai tambah dari komoditas rumput laut. Hasil penelitian menunjukkan luasan budidaya rumput laut 100 ha diperoleh 224 ton rumput laut kering dalam sekali panen (45 hari) dengan nilai Rp3.360.000.000 atau Rp16.800.000 per petak (0.5 ha). Pada luasan 100 Ha usaha budidaya rumput laut ini dapat menyerap 1.000 orang tenaga kerja. Sehingga dapat mengurangi pengangguran. komoditas rumput laut dapat dijadikan beberapa produk dengan nilai jual tinggi.

Kata Kunci: rumput laut; Pulau Panjang; tenaga kerja

ABSTRACT

Pulau Panjang is one of coastal area in Serang District with potential in marine and fisheries sectors. Seaweed farming is predicted to be able to increase community income in Pulau Panjang. This study aims to describe potency of seaweed farming in Pulau Panjang, Serang District. Data and information were collected through Focus Group Discussion (FGD), field observation and secondary data. Data were analyzed descriptively by describing about seaweed farming potency from seaweed production, average income of seaweed farmer, increased number of labour and added value of commodity. Result of this study shows that seaweed farming area of 100 ha produced 224 tons of dry seaweed in one harvest period (45 days) with value of 3.360.000 or 16.800.000 per plot area (0.5 ha). Meanwhile, it absorbs labours up to 1000 persons for 100 ha area. Thus, seaweed farming helps to reduce the number of unemployment, and it creates additional values of seaweed which they could be processed into numerous food products.

Keywords: seaweed; Pulau panjang; labour absorption

PENDAHULUAN

Budidaya rumput laut di Pulau Panjang merupakan usaha yang diminati masyarakat setempat. Usaha ini menghasilkan produk yang bernilai ekonomi, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat. Pendapat ini

sesuai dengan kajian Blankenhorn (2007) di Indonesia.

Perairan Pulau Panjang yang terletak di Teluk Banten sesuai untuk budidaya rumput laut. Pulau tersebut menurut Sallata (2007), relatif terlindung dari pengaruh arus kencang,

Korespondensi Penulis:

Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
Gedung Balitbang KP I Lt. 4 Jalan Pasir Putih Nomor 1 Ancol Timur, Jakarta Utara, Indonesia
Telp: (021) 64711583 Fax: 64700924

gelombang tinggi serta badai. Berdasarkan kondisi hidrooseanografi perairan disekitar Pulau Panjang menurut Purbani *et al.*, (2010) dipengaruhi oleh: iklim monsoon, gelombang laut maksimum satu meter, temperatur berkisar antara 29,2°C - 29.6°C, kecepatan arus laut, 25 dan 0,30 meter/detik (Arfando, 2008). Faktor lain yang berpengaruh terhadap keberhasilan budidaya rumput laut adalah serangan ikan baronang dan penyakit *ice-ice* yang ditandai dengan warna putih pada tallus rumput laut (Valderrama *et al.*, 2013).

Berdasarkan hasil penelitian Muttaqin (2007) masyarakat menerima usaha budidaya rumput laut karena 1) tersedia lahan yang memadai; 2) teknik budidaya rumput laut mudah; 3) usaha budidaya rumput laut tergolong usaha padat karya. 4) siklus budidaya rumput laut relatif pendek, 45 hari; 5) modal usaha relatif kecil, 6) harga cukup memadai dan cepat mendapat uang tunai.

Teknologi produksi berupa sistem atau metoda penanaman menurut Rasyid (2014) memegang peranan penting dalam usaha budidaya rumput laut. Hasil budidaya yang optimal menurut Micheal De San (2012), adalah dengan diversifikasi penanaman rumput laut yang menanam rumput laut dari perairan dangkal ke perairan yang lebih dalam dengan teknik patok (jangkar), sehingga menambah volume hasil panen rumput laut. Penanaman rumput laut tetap diperhatikan kebutuhan sinar matahari, karena itu rumput laut ditanam pada kedalaman 25 - 50 cm dari permukaan air (FAO, 2014).

Penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober - Desember tahun 2016 di Pulau Panjang Kabupaten Serang Provinsi Banten, dengan menggunakan data primer dan Data Sekunder Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif (Sakaran, 2000).

Potensi usaha budidaya rumput laut dapat dihitung dari jumlah produksi rumput laut dalam satuan luas dengan rumus sederhana yaitu :

$$\text{HP per petakan} = \text{JB per petakan} \times \text{Brl Panen}$$

Keterangan:

HP per petakan : Hasil Panen per petakan

JB per petakan : Jumlah Bibit per petakan

Brl panen : Berat rumput laut panen

(Sumber: Marzuki, 2014)

Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan oleh usaha budidaya rumput laut dihitung dengan rumus:

$$\text{TTK} = \text{JTKp} \times \text{Luas budi daya}$$

Keterangan:

TTK : Total Tenaga Kerja

JTKp : Jumlah Tenaga Kerja Per petakan

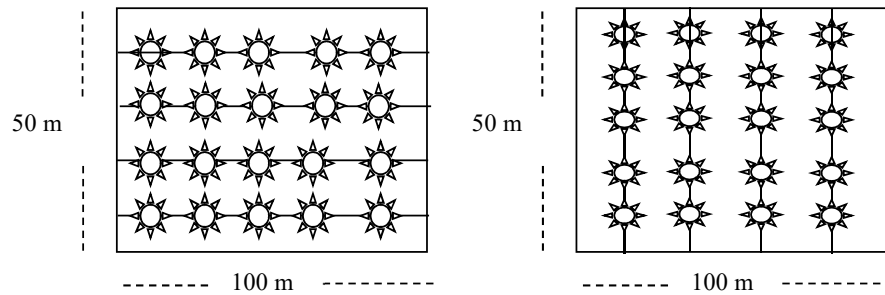
(Sumber: Marzuki, 2014)

Gambaran Umum Budi Daya Rumput laut di Pulau Panjang

Budidaya rumput laut merupakan salah satu mata pencaharian yang dilakukan oleh masyarakat Pulau Panjang. Menurut Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Serang, (2015) usaha ini mampu meningkatkan pendapatan nelayan Pulau Panjang. Berdasarkan informasi dari Kelurahan Pulau Panjang terdapat 66 Kepala Keluarga yang berprofesi sebagai pembudidaya rumput laut.

Luas areal budidaya rumput laut di Pulau Panjang kurang lebih sekitar 100 Ha. Satu petakan luasnya sekitar 0,5 Ha, sehingga dalam 100 Ha terdapat sekitar 200 petak budidaya rumput laut (Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Serang, 2015). Sistem budidaya rumput laut pada perairan pulau panjang adalah sistem longline atau tali panjang (Gambar 1) dan jenis rumput laut yang dibudidayakan adalah *Euchema cottonii* atau *Kappaphycus alvarezii*.

Sistem *longline* ini menggunakan tali dengan panjang 50 x 100 m yang dibentangkan dan diikat bibit rumput laut dengan jarak tanam tiap ikatan dalam satu tali yaitu 20-25 cm. Jarak antar tali yaitu 0,5 m dengan memperhatikan kondisi gelombang dan arus laut agar bibit rumput laut dalam satu bentangan tali dengan bentangan tali lainnya aman dan tidak terbelit satu sama lain ketika dapat pengaruh dari gelombang dan arus (SNI 7579.2:2010 metode *longline*).



Gambar 1. Sistem Longline Budi daya Rumput Laut

Sumber: SNI 7579.2:2010 metode *longline*

Perkembangan Produksi Rumput Laut di Pulau Panjang selama Tahun 2010 – 2014

Menurut Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya-KKP (2012), dalam satu petakan (0,5 hektar) budidaya rumput laut terdapat 64 tali, dengan menggunakan sistem *longline* sehingga dibutuhkan 25.600 – 32.000 titik bibit per petak (0,5 hektar). Berat bibit yang ditanam yaitu 50 – 100 gr, sehingga satu petak membutuhkan 1280 – 3200 kg bibit rumput laut. Waktu panen yang dibutuhkan rumput laut jenis *E. cottonii* yaitu 45 hari. Berat rumput laut saat panen meningkat menjadi empat kali lipat dari berat bibit, sehingga menjadi 300 – 400 gr. Dalam umur 45 hari rumput laut telah memiliki kekuatan gel dan kandungan karaginan yang maksimal sehingga harga pasarnya tinggi (Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya-KKP, 2012). Volume hasil panen per petak dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{HP per petakan} = \text{JB per petakan} \times \text{Brl Panen}$$

Keterangan:

HP per petakan : Hasil Panen per petakan

JB per petakan : Jumlah Bibit per petakan (25.600-32.000 titik bibit per petakan)

Brl panen : Berat rumput laut panen (45 hari = 300 - 400 kg)

Berdasarkan formula diatas diperoleh hasil panen rumput laut per siklus seberat 7,7 ton – 12,8 ton berat basah per petak. Menurut Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya-KKP, (2012), hasil panen rumput laut 70% dikeringkan dan dijual serta 30% dijadikan bibit atau ditanam kembali. Dari 70% hasil panen

tersebut diperoleh 5,4 ton-8,9 ton berat basah dipetakan. Di Pulau Panjang dengan luas budidaya rumput laut 100 Ha akan memperoleh hasil panen 1.075,2 ton – 1.792 ton rumput laut basah

Pendapatan Pembudidaya Rumput Laut Terhadap Upah Minimum Kabupaten (UMK)

Rata-rata pendapatan pembudidaya merupakan salah satu faktor penting untuk mendukung keberlanjutan kegiatan budidaya rumput laut apalagi jika dibandingkan dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK), Menurut Neish (2013) laut merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi masyarakat pesisir karena berkontribusi terhadap pendapatan rumah tangga nelayan perikanan tangkap.

Rumput laut yang dijual kadar ainya 12,5%, sehingga akan dihasilkan sekitar 134,4 ton – 224 ton berat kering. Menurut Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Serang (2015), Harga jual rumput laut kering di pasaran adalah Rp9000 – Rp15.000/kg. Total pendapatan dari penjualan rumput laut kering di perairan Pulau Panjang adalah Rp1.209.600.000 - Rp3.360.000.000 atau Rp6.048.000 – Rp16.800.000/petak. Pembudidaya rumput laut di Pulau Panjang panen rumput laut 4 – 5 kali selama satu tahun. Sehingga rata-rata pendapatan pembudidaya rumput laut pada tahun 2010-2014 yang disajikan pada Tabel 1.

Gambar 2 merupakan komparasi nilai produksi per petak dari usaha budidaya rumput lau di Pulau Panjang dengan UMK Kabupaten Serang.

Tabel 1. Pendapatan Relatif Dari Pembudidaya Rumput Laut (Olahan Data Produksi Rumput Laut Kabupaten Serang, 2015).

Tahun	Produksi Basah Per Tahun (kg)	Produksi Kering Per Tahun (kg)	Produksi Kering Per Bulan (kg)	Nilai Total Seluruh Pulau Panjang (Rp)	Nilai Per Petak (0.5 Ha) (Rp)
2010	7.430.000	928.812	154.802	2.322.030.000	11.610.150
2011	6.136.000	767.000	127.833	1.917.500.000	9.587.500
2012	5.304.000	663.000	110.500	1.657.500.000	8.287.500
2013	3.504.000	438.000	73.000	1.095.000.000	5.475.000
2014	1.997.000	249.625	41.604	624.060.000	3.120.300

Sumber: Olahan data lapangan, 2015

Gambar 2 menunjukkan pendapatan rata-rata pembudidaya rumput laut lebih besar dari Upah Minimum Kabupaten Serang. Pada tahun 2010 selisih pendapatan dibandingkan dengan UMK Kabupaten Serang mencapai Rp10.509.000,00. Pada tahun 2014 selisih pendapatan terendah jika dibandingkan dengan UMK mencapai Rp780.000,00. Hal ini dapat menggambarkan bahwa pada tahun 2010 kualitas perairan di Pulau Panjang dalam kondisi bagus jika dibandingkan dengan kualitas perairan pada tahun 2014, sehingga mempengaruhi keberhasilan pertumbuhan rumput laut (Soejarwo, 2016).

Penyerapan Tenaga kerja

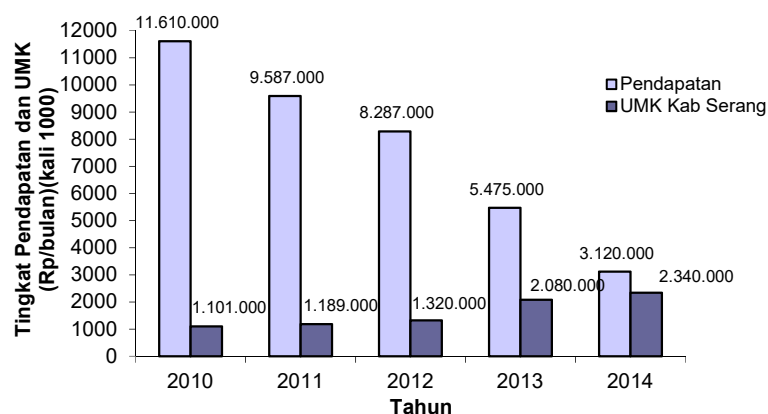
Penyerapan tenaga kerja merupakan indikator dalam pengembangan budidaya rumput laut. Menurut Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Serang (2015), Satu petak budidaya rumput laut memerlukan tenaga kerja 5 - 10 orang. Dengan demikian, kebutuhan tenaga kerja pada budidaya rumput

laut di Pulau Panjang dapat dihitung dengan rumus:

$$TTK = JTKp \times \text{Luas Budidaya}$$

Kebutuhan tenaga kerja di Pulau Panjang pada musim tanam mencapai 1000 – 2000 orang. Sementara itu pada saat musim panen, satu petakan budidaya rumput laut dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 3 - 5 orang, sehingga rata-rata kebutuhan tenaga kerja pada musim panen rumput laut di Pulau Panjang yaitu 600 – 1.000 orang.

Tenaga kerja yang dibutuhkan pada saat musim tanam lebih besar daripada musim panen, karena penanaman rumput laut memerlukan tenaga kerja untuk mengikat bibit rumput laut pada tali ris. Sementara itu, untuk pemanenan tidak memerlukan tahap pengikatan bibit sehingga kebutuhan tenaga kerja lebih sedikit. Dengan serapan tenaga kerja yang mencapai ribuan, maka kegiatan budidaya rumput laut berpotensi mengurangi jumlah pengangguran tenaga kerja usia produktif di Pulau Panjang

**Gambar 2. Perbandingan Tingkat Pendapatan dengan UMK Kabupaten Serang.**

Sumber: Olahan data produksi rumput laut Kab.Serang, 2015

Nilai Tambah Komoditas Rumput Laut

Rumput laut merupakan salah satu sumber devisa negara dan sumber pendapatan bagi masyarakat pesisir. Pada industri rumput laut digunakan dalam industri makanan, minuman dan obat-obatan, karena kandungan agar, *alginate* dan karagenan (Marzuki, 2014). Produksi rumput laut di Pulau Panjang mencapai 60 – 120 ton per tahun, sehingga usaha pengolahan skala rumah tangga atau skala menengah untuk mengolah rumput laut perlu dikembangkan. Pada tahun 2012-2013 di Pulau Panjang terdapat usaha olahan rumput laut dodol dan manisan. Hasil olahan tersebut telah meningkatkan nilai tambah bagi rumah tangga pembudidaya rumput laut dan pendapatan masyarakat Pulau Panjang.

Sebagai ilustrasi dalam pembuatan dodol rumput laut, diperlukan 1 kg rumput laut kering ditambah dengan 3 kg gula pasir maka akan dihasilkan 3 kg dodol. Kemudian setelah rumput laut menjadi dodol maka harga dodol rumput laut tersebut adalah Rp15.000 (per 0,5 kg) atau Rp30.000 (per 1 kg). Jika dibandingkan dengan harga rumput laut kering Rp9.000 – 15.000 per kg, maka dengan adanya nilai tambah komoditi rumput laut menjadi dodol, rumput laut mempunyai harga jual yang lebih tinggi. Produk hasil olahan rumput laut tersebut dipasarkan di sekitar Pulau Panjang terutama Cilegon, Kota Serang, Balaraja dan sekitarnya. Perbandingan harga jual rumput laut dalam bentuk olahan dan dalam bentuk kering dapat dipelajari pada Tabel 2.

PENUTUP

Penelitian ini menyimpulkan bahwa potensi produksi usaha budidaya rumput laut di Pulau Panjang dengan komoditas *E. Cottoni* yaitu sebanyak 224 ton (kering) dalam luas lahan 100 Ha. Usaha budidaya rumput laut

ini mampu menyerap banyak tenaga kerja dan berpotensi dalam mengurangi jumlah pengangguran. Serapan tenaga kerja pada saat musim tanam sebanyak 1000 – 2000 tenaga kerja dan sebanyak 600 - 1000 orang pada saat musim panen. Rumput laut dapat diolah menjadi berbagai macam produk, sehingga berpeluang meningkatkan harga jual rumput laut

UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini diselenggarakan berkat pembiayaan dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Dr. Priana Sudjono yang telah memberikan dukungan akademis dalam menyelesaikan penelitian ini. Terima Kasih diucapkan juga kepada Dinas kelautan dan Perikanan Kabupaten Serang yang telah membantu dalam hal data dan informasi selama kegiatan penelitian ini berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Arfando, R. 2008. Perubahan Area Mangrove di Pulau Panjang Kabupaten Serang Provinsi Banten. Skripsi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Universitas Indonesia. Depok
- Blankenhorn, S.U. 2007. Seaweed farming and artisanal fisheries in an Indonesian seagrass bed—Complementary or competitive usages. in partial fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Natural Sciences (Dr. rer. nat.). Dissertation Faculty 2 Biology/Chemistry. University Bremen.
- Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Serang. 2015. Buku DKP Dalam Angka 2014. DKP Kab. Serang.
- Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya—Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2012. Cara Praktis Memanen Rumput Laut Yang Memenuhi Standar Kualitas. Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jakarta

Tabel 2. Perubahan Harga Rumput Laut Pada Beberapa Produk Olahan

No	Produk	Perbedaan Harga (Rp/per Kg)
1.	Rumput laut kering	9000-15000
2.	Manisan Rumput Laut	25.000
3.	Dodol Rumput Laut	30.000
4.	Nata de Seaweed	35.000
5.	Bakso Rumput Laut	50.000

Sumber: Olahan data lapangan

- FAO. 2014. The State of World Fisheries and Aquaculture 2008. Food And Agriculture Organization Of The United Nations. Rome.
- Marzuki, M. 2014. Desain Pengelolaan Budidaya Laut Berkelanjutan di Teluk Saleh Kabupaten Sumbawa. Disertasi, Program Pascasarjana IPB, Bogor.
- De San, M. 2012. The Farming of Seaweed- Implementation of a Regional Fisheries Strategy For The Eastern-Southern Africa and India Ocean Region. Report/Rapport 10th European Development Fund.
- Muttaqin, Z. 2007. Rumput Laut Sebagai Komoditi Bisnis. Buletin Pengolahan dan Pemasaran Perikanan Craby dan Starky, Edisi Juli 2007.
- Neish, I.C. 2013. Social and economic dimensionsof carrageenan seaweed farming in Indonesia. Fisheries and Aquaculture Technical Paper. No 580, 61-89.
- Purbani, D., B. Sukresno, E. Mustikasari, G. Kusumah dan T.B, Solihuddin. 2010. Optimalisasi Data Fisik Perairan Untuk Kajian Kelimpahan Dan Jenis Ikan Di Teluk Banten. Laporan Penelitian Balitbang Kelautan dan Perikanan. Jakarta.
- Rasyid. 2004. Berbagai Manfaat Alga. Jurnal Oseana, 3, 9-15
- Sallata, E. A. 2007. Kajian Potensi Sumberdaya Untuk Pengelolaan Budididaya Rumput Laut dan Ikan Kerapu di Wilayah Pesisir Kecamatan Ampibabo, Kab. Parigi Moutong, Sulawesi Tenggara. Skripsi, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Sekaran, U. 2000. Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Soejarwo, P.A. 2016. Penerapan RAPFISH Dalam Penilaian Keberlanjutan Budidaya Rumput Laut di Kawasan Pesisir Pulau Panjang Serang, Banten. Bandung, [Tesis]: Program MagisterTeknik Lingkungan, ITB.
- Standar Nasional Indonesia. 2010. Produksi rumput laut koton (Eucheuma cottoni) – bagian 2: Metode long-line.
- Valderrama, D., J. Cai, N. Hishamunda and N. Ridler. 2013. Social And Economic Dimensions Of Carrageenan Seaweed Farming. Fisheries and Aquaculture Technical Paper No. 580, pp 204.

Buletin Ilmiah “MARINA” Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Pedoman Bagi Penulis

UMUM

Kertas	:	A4 (21,0 x 29,7 cm)
Margin	:	Kiri 3 cm Bawah, Kanan dan Atas 2 cm
Huruf	:	Arial, 11 pt, hitam, 1,5 spasi. ketik dalam Bahasa Indonesia yang baik dan benar, tidak diperkenankan menggunakan singkatan yang tidak umum.
Struktur	:	Judul, Abstrak, Pendahuluan, Pokok Bahasan 1,2,3...n, Penutup, Ucapan Terima Kasih dan Daftar Pustaka

Naskah hanya diterima sekretariat redaksi secara *online* melalui alamat web **<http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/mra>**.

Media komunikasi dengan sekretariat redaksi melalui alamat *email*: **marina.losek@gmail.com**.

NASKAH

Redaksi hanya menerima naskah yang belum pernah dipublikasikan dan tidak dalam proses penerbitan pada publikasi lain. Buletin ini merupakan publikasi ilmiah yang bersumber dari ide, gagasan, opini, temuan lapangan terkait dengan isu aktual di bidang sosial ekonomi kelautan dan perikanan.

SISTEMATIKA PENULISAN NASKAH

Judul

Judul harus ditulis secara ringkas (maksimal 15 kata), tetapi cukup informatif untuk menggambarkan isi tulisan. Ditulis dalam Bahasa Indonesia dan di bawahnya dalam Bahasa Inggris, menggunakan huruf Arial, kapital Bold, 12 pt, center.

Penulis dan institusi

Penulis dan Institusinya ditulis berurutan di bawah judul. Nama penulis ditulis dengan huruf Arial, kapital bold, 10 pt, center. Institusi asal (alamat, nomor telepon, nomor faksimil, serta e-mail) ditulis dengan huruf Arial, kapital dan kecil, 10 pt, center.

Abstrak

Ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, tidak lebih dari 250 kata dan hanya satu paragraf. Abstrak memberikan informasi singkat namun jelas tentang alasan penelitian dilakukan, tujuan yang ingin dicapai, metode yang digunakan, hasil yang diperoleh serta kesimpulan. ditulis dengan huruf Arial, 10 pt.

Kata Kunci

Ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Inggris, minimal 3 kata kunci yang ditulis setelah abstrak.

Pendahuluan

Pendahuluan diuraikan tanpa sub judul yang memuat; arti penting tema naskah, pernyataan masalah, tujuan, dan metode yang digunakan.

Pokok Bahasan 1, 2, 3 ...n

Pokok bahasan adalah sub judul dari naskah. Naskah minimal terdiri dari 2 (dua) pokok bahasan yang menyuguhkan data dan informasi yang ditemukan peneliti serta dipakai sebagai dasar penyimpulan. Data dan informasi yang terkumpul dapat berupa uraian ide, opini, gagasan, temuan lapangan. Tabel, grafik dan gambar dapat digunakan untuk memperjelas dan mendukung uraian yang diberikan.

Penutup

Penutup merupakan pernyataan ringkas dan jelas yang diperoleh dari uraian dalam pokok bahasan untuk menjawab tujuan yang disajikan dalam bentuk paragraf.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan Terima Kasih disampaikan kepada lembaga dan/atau pihak yang membantu pelaksanaan riset atau pembuatan makalah, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Daftar Pustaka

Dicantumkan dalam naskah bila ada pengutipan dari sumber lain. Berjumlah minimal 15 sumber pustaka. Proporsi daftar pustaka yang diacu yaitu 80% merupakan rujukan dari publikasi terbaru dari terbitan 5 tahun terakhir. Tuliskan hanya pustaka yang dirujuk dalam makalah saja. Hindari pustaka yang bersumber pada majalah, koran, atau media lainnya yang non-ilmiah. Disusun berdasarkan abjad dan disarankan menggunakan aplikasi Mendeley.

Buku:

Huda, H.M., R.A. Wijaya dan S. Koeshendrajana. 2011. *Dinamika Perkembangan Sosial Ekonomi Usaha Rumah Tangga Petambak Garam*. In Koeshendrajana (eds.), *PANELKANAS: Dinamika Perkembangan Usaha, Pendapatan dan Konsumsi Rumah Tangga*. Badan Riset Kelautan dan Perikanan. Jakarta.

Prosiding:

Solihin, A., S. Koeshendrajana dan F. Y. Arthatiani. 2012. *Harmonisasi Hukum Internasional Dalam Pemberantasan IUU Fishing dan Implementasinya dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia*. In Isnansetyo *et al.* (eds.), *Prosiding Seminar Nasional IX Tahun 2012*, SE-04: 1-17. Jurusan Perikanan Fakultas Pertanian UGM. Yogyakarta.

Jurnal Ilmiah:

Pitcher, T.J. and D.B Preikshot. 2001. *Rapfish: A Rapid Appraisal Technique to Evaluate the Sustainability Status of Fisheries*. *Fisheries Research*. Vol 49(3): 255-270

Artikel dari situs internet:

Sahyuti. 2012. *Ciri-ciri Masyarakat Adat*. <http://syahyutivariabel.blogspot.com/2012/07/ciri-ciri-masyarakat-adat.html>. (diakses 27 Desember 2012).

Laporan:

Koeshendrajana, S., F. N. Priyatna, I. Mulyawan, A. Ramadhan, E. Reswati, R. Triyanti, A. Fahrudin, E. S. Kartamihardja dan C. M. Witomo. 2008. *Riset Identifikasi, Karakterisasi dan Valuasi Sosial Ekonomi Sumber daya Perairan Umum Daratan*. Laporan Teknis Kegiatan Penelitian. Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. BRKP

Thesis, Disertasi :

Sufii, S. 2008. Konvergensi Ekonomi Regional di Indonesia Tahun 1985-2006. Thesis. Fakultas Ekonomi. Universitas Indonesia. Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik. Jakarta.

Tabel

Judul tabel (Arial, center, & 11 pt) diberi nomor urut dan ditulis di atas tabel. Tabel ditulis dalam bahasa Indonesia dan Inggris, diketik menggunakan program MS-Word dan tidak dalam bentuk JPEG. Sumber dicantumkan di bawah tabel.

Contoh:

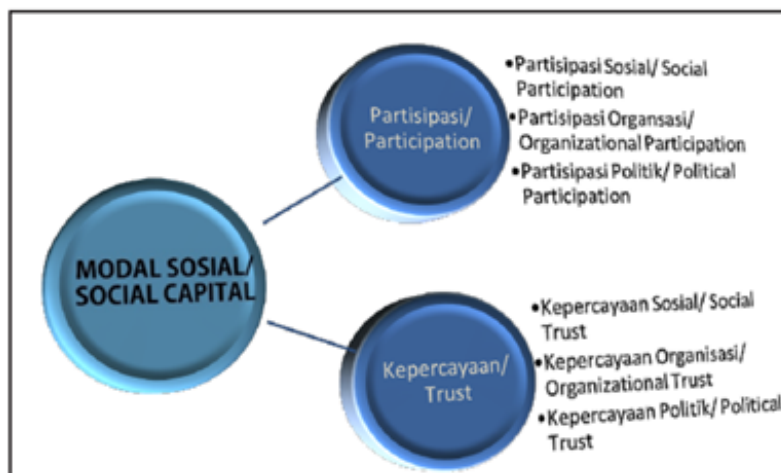
Tabel 1. Total Nilai Ekonomi Mangrove di Wilayah Pesisir Kabupaten Merauke.

Kategori Nilai Ekonomi	Total Nilai (Rp/Tahun)	Total Nilai (Rp/Ha/Tahun)
Nilai Guna Langsung	121.120.873.947	11.964.919
Nilai Guna Tidak Langsung	48.361.817.303,4	4.777.419
Nilai Pewarisan	2.728.107.120	269.496
Total	177.419.407.910	17.528.367

Gambar

Judul Gambar (Arial, center, & 11 pt) diberi nomor urut dan ditulis di bawah Gambar. Gambar ditulis dalam bahasa Indonesia dan Inggris, diketik menggunakan program MS-Word dan dalam bentuk JPEG dengan kualitas gambar resolusi diatas 72 dpi. Sumber dicantumkan di bawah judul.

Contoh:



Gambar 2. Kerangka Modal Sosial.



BALAI BESAR RISET SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN

GEDUNG BALITBANG KP Lt. 3-4

JALAN PASIR PUTIH NOMOR 1 ANCOL TIMUR, JAKARTA UTARA

TELP .: (021) 6471 1583 FAX.: 64700924

WEBSITE: <http://bbpse.litbang.kkp.go.id>-E-MAIL: bbrsosek@yahoo.com



9 772502 080033